

**AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI
MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI INDONESIA**



Oleh:

Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM: 17300016053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Studi Islam

YOGYAKARTA
2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM : 17300016053
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Antar Iman

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2023
Saya yang menyatakan,



Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM: 17300016053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi : AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI
MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI INDONESIA

Ditulis oleh : Wiwin Siti Aminah Rohmawati

NIM : 17300016053

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Studi Antar Imam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 05 Agustus 2024

An. Rektor/
Ketua Sidang,



Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP.: 197209122001121002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 24 APRIL 2024), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA **Dr. WIWIN SITI AMINAH ROHMAWATI**, NOMOR INDUK: **17300016053** LAHIR DI BANDUNG TANGGAL 05 JUNI 1975,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **STUDI ANTAR IMAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-966**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA, 05 AGUSTUS 204

An. REKTOR
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 197209122001121002

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	:	WIWIN SITI AMINAH ROHMAWATI	<i>(Wiwon Rohmawati)</i>
NIM	:	17300016053	
Judul Disertasi	:	AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA	
Ketua Sidang	:	Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.	<i>(Al Makin)</i>
Sekretaris Sidang	:	Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.	<i>(Ahmad Rafiq)</i>
Anggota	:	1. Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA. (Promotor/Penguji) 2. Dr. Suhadi, S.Ag., M.A. (Promotor/Penguji) 3. Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D. (Penguji) 4. Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. (Penguji) 5. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. (Penguji) 6. Pdt. Dr. Elia Tambunan, S.Th., M.Pd (Penguji)	<i>(Wening Udasmoro)</i> <i>(Suhadi)</i> <i>(Siti Syamsiyatun)</i> <i>(Ahmad Muttaqin)</i> <i>(Inayah Rohmaniyah)</i> <i>(Elia Tambunan)</i>

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari SENIN Tanggal 05 Agustus 2024

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:
Predikat Kelulusan	:	Pujian (Cumlaude) Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 197412141999031002

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA. ()

Promotor II

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM	: 17300016053
Program Studi	: Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi	: Studi Antar Iman

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Promotor



Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama : Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM : 17300016053
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Antar Iman

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2024
Promotor



Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM	:	17300016053
Program Studi	:	Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Antar Iman

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2024

Penguji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM	:	17300016053
Program Studi	:	Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Antar Iman

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2024

Penguji

Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

AGENSI PEREMPUAN DI TENGAH DOMINASI MASKULIN DALAM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Yang ditulis oleh:

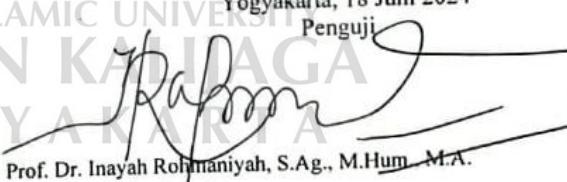
Nama : Wiwin Siti Aminah Rohmawati
NIM : 17300016053
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Antar Iman

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka. Pascasarjana

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2024

Pengajar


Prof. Dr. Inayah Rohmawati, S.Ag., M.Hum, M.A.

ABSTRAK

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki posisi strategis dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan antaragama di Indonesia melalui dialog antaragama. Posisi strategis tersebut masih belum optimal dari sudut pandang keanggotaan dan peran yang dijalankan para anggotanya yang masih memiliki perspektif maskulin yang kuat. Hal itu ditunjukkan dengan minimnya pelibatan perempuan dalam organisasi ini. Penelitian ini mengkaji agensi perempuan dalam FKUB dengan epistemologi dasar bahwa perempuan merupakan agen penting dalam menyemai nilai toleransi dan perdamaian. Penelitian ini fokus pada tiga masalah utama yakni pertama, struktur yang berkontribusi terhadap minimnya perempuan dalam FKUB dan konsekuensinya bagi dialog antaragama di Indonesia; kedua, agensi perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang gender, keberagaman, dan dialog antaragama; ketiga, strategi agensi yang dipilih dan digunakan perempuan di dalam struktur FKUB yang didominasi maskulin. Penelitian kualitatif yang mengkombinasikan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan ini melibatkan tujuh puluh delapan informan, terdiri dari empat puluh tujuh perempuan dan tiga puluh satu laki-laki anggota FKUB dari dua puluh tujuh provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi Indonesia bagian timur (Nusa Tenggara Timur), Indonesia bagian tengah (Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara) dan Indonesia bagian barat (Aceh, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Penelitian ini merupakan jenis penelitian partisipatif yang menekankan pentingnya subjektivitas manusia dan kesadaran dalam menciptakan pengetahuan, dan menempatkan manusia secara emansipatif dan personal. Dalam mengumpulkan dan mengkaji data-data, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni *pertama*, pendekatan sosiologis dengan fokus perhatian pada interaksi antara agama, politik, budaya dan masyarakat. *Kedua*, pendekatan fenomenologis yang fokus pada pengalaman hidup manusia, yakni apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena dan bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya.

Menggunakan konsep dominasi maskulin dari Bourdieu dan maskulinitas hegemonik dari Connell dan Messerschmidt, penelitian ini

menunjukkan empat struktur dominasi maskulin di FKUB yakni ketimpangan gender dalam struktur kepengurusan (laki-laki 91,9% dan perempuan 8,1%), dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, bias gender, dan penempatan perempuan di lapisan kedua dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang memengaruhi dominasi ini meliputi konstruksi sosial patriarkis, problem internal perempuan dalam majelis agama, bias gender dalam pemahaman ajaran agama, serta ketidakjelasan peraturan pemerintah dan implementasinya. Penelitian ini menemukan bahwa maskulinitas hegemonik hadir di FKUB dalam bentuk subordinasi perempuan baik secara struktural maupun kultural. Namun, ada peningkatan jumlah anggota perempuan di banyak FKUB karena adanya upaya mendorong perubahan habitus baru yang lebih adil gender, baik secara individual maupun institusional. Berdasarkan teori praktik sosial Bourdieu, ditemukan dua habitus utama di FKUB yakni visi inklusif terhadap perbedaan agama dan etnis, tetapi belum inklusif bagi keberagaman gender; dan dominasi laki-laki di semua organisasi keagamaan yang memengaruhi mental model anggota FKUB tentang peran perempuan. Habitus lain yang memengaruhi perempuan anggota FKUB adalah keyakinan akan kesetaraan gender, yang didukung oleh wawasan luas dan keaktifan mereka di berbagai organisasi, khususnya organisasi perempuan. Sebagai agen aktif, dengan berbagai modal yang dimiliki, perempuan di FKUB melakukan kritik, negosiasi, lobi, dan desakan untuk mengubah situasi yang maskulin dan tidak adil. Modal yang mendukung perjuangan mereka di antaranya modal sosial, kultural, simbolik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan lima strategi yang digunakan perempuan anggota FKUB dalam menghadapi tantangan yakni komunikasi asertif, suportif, edukasi, suksesif, dan intervensi. Selain itu, tiga distingsi yang memperkuat agensi mereka adalah gaya komunikasi yang luwes, keterampilan *detail oriented*, dan pendekatan lembut yang khas perempuan. Dengan agensi perempuan dan anggota FKUB yang kapabel dalam isu keberagaman dan perspektif gender, secara teoretis dimungkinkan terbentuknya habitus baru di FKUB dengan visi inklusif bagi keberagaman gender. Hal ini akan menghasilkan keseimbangan antara maskulinitas dan feminitas dan kepemimpinan yang setara laki-laki dan perempuan di FKUB.

Kata kunci: *FKUB, Dominasi Maskulin, Agensi Perempuan, Kerukunan antaragama.*

ABSTRACT

The Religious Harmony Forum (FKUB) holds a strategic position in maintaining and fostering inter-religious harmony in Indonesia through inter-religious dialogue. However, this strategic potential remains underutilized, particularly concerning membership and the roles played by its members, which are predominantly masculine. This is evidenced by the minimal involvement of women in the organization. This research examines women's agency in FKUB, positing that women are essential agents in promoting tolerance and peace. The study addresses three primary issues: the structural factors contributing to the lack of female participation in FKUB and its implications for interreligious dialogue in Indonesia; women's agency in FKUB, including their perspectives on gender, diversity, and interreligious dialogue; and the strategies employed by women to navigate the masculine-dominated FKUB structure. This qualitative research combines fieldwork and library research, involving seventy-eight informants—forty-seven women and thirty-one men—from FKUB members across twenty-seven provinces and districts/cities, spanning eastern Indonesia (East Nusa Tenggara), central Indonesia (South Kalimantan, Bali, South Sulawesi, and North Sulawesi), and western Indonesia (Aceh, Lampung, West Sumatra, North Sumatra, Riau Islands, DKI Jakarta, Special Region of Yogyakarta, Central Java, and East Java). The study adopts a participatory research approach, emphasizing human subjectivity and awareness in knowledge creation and placing humans in an emancipatory and personal context. Data collection and analysis utilized two approaches: a sociological approach focusing on the interaction between religion, politics, culture, and society and a phenomenological approach emphasizing the lived experiences of research subjects.

Drawing on Bourdieu's concept of masculine dominance and Connell and Messerschmidt's concept of hegemonic masculinity, the research identifies four structures of masculine dominance in FKUB: significant gender inequality in the management structure (men 91.9%

and women 8.1%), male dominance in decision-making, gender bias, and the marginalization of women in decision-making processes. Factors influencing this dominance include patriarchal social constructions, internal challenges faced by women in religious councils, gender-biased interpretations of religious teachings, and ambiguous government regulations and their implementation. The research reveals that hegemonic masculinity manifests in FKUB through both structural and cultural subordination of women. Nevertheless, there has been an increase in female membership in many FKUBs due to efforts promoting a more gender-equitable habitus, both individually and institutionally. According to Bourdieu's theory of social practice, two primary habitus are identified within FKUB: an inclusive vision of religious and ethnic differences, yet lacking inclusivity for gender diversity, and male dominance in religious organizations shaping FKUB members' perceptions of women's roles. An alternative habitus influencing female FKUB members is their belief in gender equality, supported by their broad insights and active involvement in various organizations, especially women's organizations. As active agents, women in FKUB engage in criticism, negotiation, lobbying, and exerting pressure to transform masculine and unjust situations, leveraging their social, cultural, symbolic, and economic capital. The study identifies five strategies employed by female FKUB members to overcome challenges: assertive communication, supportive, educational, successive, and intervention. Additionally, three characteristics that strengthen their agency are a flexible communication style, detail-oriented skills, and a soft approach unique to women. With women's agency and FKUB members adept in diversity and gender perspectives, it is theoretically feasible to develop a new habitus within FKUB, characterized by an inclusive vision for gender diversity. This will foster a balance between masculinity and femininity and achieve equal leadership for men and women in FKUB.

Keywords: *FKUB, Masculine Domination, Women's Agency, Interreligious Harmony.*

الملخص

يمتاز منتدى الوئام بين الأديان بموقف استراتيجي في بناء الانسجام بين الأديان وتعزيز الإخاء في إندونيسيا بإقامة الحوار بين الأديان إلا أن هذا الموقف لم يعمل بالشكل الأمثل من وجهة نظر العضوية، لأن أعضاؤها لا تزال تتمتع بمنظور ذكوري قوي. ويتجلّى ذلك من قلة مشاركة المرأة في هذا المنتدى. تناولت هذه الرسالة وكالة المرأة في منتدى الوئام بين الأديان مع النظرية المعرفية الأساسية القائلة بأن المرأة عنصر مهم في غرس قيم التسامح والسلام. ارتكزت هذه الرسالة على ثلاث مشاكل رئيسية، أولاً، الهيكل الذي يساهم في تقليل عدد المرأة في المنتدى وما يتربّط عليه تقليل مساهمتها في الحوار بين الأديان في إندونيسيا؛ ثانياً، وكالة المرأة في المنتدى ومنظوراتها بشأن النوع الاجتماعي والتنوع وال الحوار بين الأديان؛ ثالثاً، استراتيجيات الوكالة التي تختارها وتستخدمها المرأة في هيكل المنتدى الذي تهيمن عليه بنية ذكورية. هذه الرسالة عبارة عن بحث نوعي يجمع بين بحث ميداني ومكتبي و يحتوي على ثمانية وسبعين مخيماً، بما في ذلك سبع وأربعون مخربة وواحد وثلاثون مخيماً، من سبعة وعشرين منتدى من مناطق ومدن مختلفة في إندونيسيا تغطي شرق إندونيسيا (نوسا تينججara الشرقية) ووسط إندونيسيا (كاليمانتان الجنوبية وبالي وسولاويزي الجنوبي وسولاويزي الشمالية)، وغرب إندونيسيا (آتشيه ولامبونج وسومطرة الغربية وسومطرة الشمالية وجزر رياو وجاكرتا ومنطقة يوجياكارتا الخاصة وجاوة الوسطى وجاوة الشرقية). تعد هذه الرسالة من أنواع البحوث التشاركية التي تؤكد على أهمية الذات الإنسانية والوعي في خلق المعرفة، وتضع الإنسان في موقف تحرري وشخصي. استخدم الباحث منهجين في جمع البيانات ودراستها، أوهما المنهج الاجتماعي الذي يركّز على التفاعلات بين الدين والسياسة والثقافة والمجتمع، وثانيهما، المنهج الفينومينولوجي الذي يركّز على تحرية الحياة الإنسانية، أي ما يعمله الإنسان عند مروره بظاهرة معينة وكيف يفسر تلك التجربة.

ووفقاً لمفهوم الهيمنة الذكورية عند بورديو Bourdieu والذكورة المهيمنة من كونيل ومسيرشميット Connell ومسيرشميット Messerschmidt، وجدنا أربعة هيأكل للهيمنة الذكورية في منتدى الوئام بين الأديان في شكل عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الهيكل الإداري التابع للمنتدى

حيث تبلغ نسبة الرجل ٩١،٩ % والمرأة ٨،١ %، وهيمنة الرجل في صنع القرار، والتحيز بين الجنسين، ووضع المرأة في الطبقة الثانية. وتشمل العوامل التي تؤثر على هذه الهيمنة البناء الاجتماعي الأبوي، والمشاكل الداخلية التي تواجهها المرأة نفسها والمشاكل التي تحدث في المجلس الديني، والتحيز بين الجنسين في فهم التعاليم الدينية، وعدم الوضوح في القرارات الحكومية وتنفيذها. توصلت هذه الرسالة إلى أن الذكورة المهيمنة قائمة في منتدى الوئام بين الأديان في شكل تبعية المرأة هيكلياً وثقافياً. ومع ذلك، فقد توصلت هذه الرسالة إلى زيادة عدد المرأة في العديد من المنتديات للوئام بين الأديان بسبب الجهد المبذول لتغيير هابيتوس جديداً أكثر إنصافاً بين الجنسين، سواء كان على المستوى الفردي أو المؤسسي. استناداً إلى نظرية بورديو في الممارسات الاجتماعية، وجدنا التوعين الأساسيين من الهابيتوس، أولئك ما أن منتدى له رؤية شاملة للاختلافات الدينية والعرقية ولكن ليس لديه رؤية شاملة للتنوع بين الجنسين؛ وهيمنة الذكور في جميع المنظمات الدينية التي تؤثر على النموذج العقلي لأعضاء منتدى الوئام بين الأديان فيما يتعلق بدور المرأة. والهابيتوس الثاني الذي يؤثر على المرأة في المنتدى هو إيمانها واعتقادها بالمساواة بين الرجل والمرأة، وبصيرتها الواسعة ونشاطها في مختلف المنظمات، وخاصة المنظمات النسائية. والمرأة بصفتها وكالة ناشطة تملك العديد من الرأسمال، تستطيع أن تقوم بالنقد والتفاوض وكسب التأييد والضغط لتغيير هذا الوضع الذكوري التعسفي. والرأسمال الذي يدعم نضالها يشمل الرأسمال الاجتماعي والثقافي والرمزي والاقتصادي. كما توصلت هذه الرسالة إلى خمس استراتيجيات المرأة كعضو منتدى في مواجهة التحديات وهي التواصل الحازم الداعم والتعليمي والناجح والتدخلي، وإلى ثلاث خصائص تعزز وكالتها وهي اتصالها المرن ومهاراتها التفصيلية وطريقتها الناعمة في التعامل. مع وجود الوكالة النسائية في المنتدى وقدرتها على التعامل مع قضايا التنوع ووجهات نظر النوع الاجتماعي، يرتب في المستقبل - من الناحية النظرية - تشكيل هابيتوس "جديد" برؤية شاملة للتنوع بين الجنسين، حتى يظهر التوازن بين الرجل والمرأة، وبين الذكورة والأنوثة، وجود القيادة المتساوية بين الرجل والمرأة في المنتدى.

الكلمات المفتاحية: منتدى الوئام بين الأديان، الهيمنة الذكورية، وكالة المرأة، الإخاء

بين الأديان

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Τ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ζ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عَدّة	ditulis ditulis	<i>Muta 'addidah</i> <i>'iddah</i>
-----------------	--------------------	---------------------------------------

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حَكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	A i u
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------

فَعَل	Fathah	ditulis	<i>fa 'ala</i>
ذَكْر	Kasrah	ditulis	<i>žukira</i>
يَذْهَب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah+alif جا هلیہ	Ditulis	A
Fathah+ya' mati یسعی	Ditulis	Jahiliyyah
Kasrah+ya' mati کرمی	Ditulis	a
Dhammah+wawu mati فروض	Ditulis	yas'a
	Ditulis	i
	Ditulis	karim
	Ditulis	u
	Ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الآن أعدت لعن شكرتوم	ditulis ditulis ditulis	<i>A'antum</i> <i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Žawi al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
-----------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan Rahman dan Rahim-Nya memampukan peneliti untuk menyelesaikan disertasi yang berjudul Agensi Perempuan di Tengah Dominasi Maskulin dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Shalawat dan salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan selesainya disertasi ini, izinkan peneliti menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. dan Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.), selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. dan Dr. Phil Munirul Ikhwan, Lc., M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA. selaku Promotor 1, yang dengan sabar dan teliti telah memberikan arahan, saran dan kritik yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Dr. Suhadi, S.Ag., M.A., selaku Promotor 2, yang dengan sabar dan teliti telah memberikan arahan, saran dan kritik yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif kepada peneliti dalam proses penyelesaian disertasi ini.
7. Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif kepada peneliti dalam proses penyelesaian disertasi ini.
8. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif kepada peneliti dalam proses penyelesaian disertasi ini.
9. Segenap admin dan tendik pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menempuh jenjang pendidikan program doktor sampai selesai.

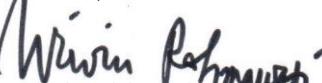
10. Rektor Universitas Islam Darussalam (UID), Ciamis, Jawa Barat, Dr. Hj. N. Hani Herlina, S.Ag., M.Pd.I, beserta jajarannya, Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya M.Pd.I dan seluruh civitas akademika UID Ciamis, yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 hingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Ayahanda H. Memed dan Ibunda Hj. Euis Komariah, dan ibu mertua Hj. Khusnul Khatimah (almarhumah) atas segala doa dan kasih sayang yang tidak pernah putus.
12. Suami sekaligus guruku tercinta, Achmad Munjid, Ph.D dan anak-anak tersayang, Hamid Afkar Aulia, Nabila Husna dan Ahsan Munawwar, serta seluruh keluarga besar yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan mereka semua tak terhingga dalam perjalanan panjang pendidikan peneliti hingga berada di titik sekarang ini.
13. Prof. Dr. H. Djam'annuri, M.A., Prof. Prof. Dr. H. Machasin, M.A.. dan Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. yang telah mendoakan dan mendukung penuh sehingga peneliti mendapatkan beasiswa 5000 Doktor dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
14. Pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), khususnya pimpinan the Faculty of Social Sciences, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan disertasi selama empat bulan.
15. Nusantara Institute dan sahabat Sumanto Al Qurtuby, yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti selama penyelesaian disertasi.
16. Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti selama melakukan penelitian lapangan di Bali, dan Meichi Padmavati, Penasihat FKUB Tomohon, serta pihak Kanwil Kemenag Sulawesi Utara yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti selama melakukan penelitian di Manado.

17. Para narasumber yang telah mendukung dan memberikan informasi yang amat berharga sebagai bahan dasar dalam penulisan disertasi ini.
18. Para guru dan senior, Prof. Moch Nur Ichwan, Zainal Abidin Bagir, Ph.D., Mbak Alissa Wahid, Mas Rakhmad Hidayat, Mas Nur Hasyim, Dr. Witriani, dan masih banyak lagi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu, yang telah memberikan inspirasi dan masukan-masukan penting dalam penyusunan disertasi ini.
19. Kolega peneliti di Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis dan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, serta di FKUB Provinsi DIY. Sahabat-sahabat peneliti di Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (INTERFIDEI), Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga, di Srikandi Lintas Iman (SRILI), di Jaringan Gusdurian, Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius (PAPPIRus), di Fatayat NU, di Muslimat NU DIY, dan di Yayasan Bumi Aswaja yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu, menyemangati dan memberi dukungan moral dan spiritual selama penelitian dan penulisan disertasi ini. Penghargaan khusus diberikan kepada sahabat peneliti, Erin Gayatri, Arina Rahmatika, Anna Amalia, Anselmus Dorewoho Atasoge dan Kamilia Hamidah, atas dukungan moral dan bantuannya selama penelitian dan penulisan disertasi ini.

Dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan, peneliti memohon kepada Allah SWT agar senantiasa menganugerahkan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan kepada nama-nama di atas dan juga masih banyak nama yang tidak dapat peneliti sebutkan di sini. Semoga disertasi ini bermanfaat dan memberi kontribusi nyata bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil gender, rukun dan damai.

Yogyakarta, 18 Juni 2024

Peneliti,



Wiwin Siti Aminah Rominawati

NIM: 17300016053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teoretis	20
1. Arena dan Habitus dalam konteks FKUB	21
2. Telaah Modal	26
3. Maskulinitas Hegemonik	29
4. Agensi Perempuan dalam FKUB	34
5. Dialog Antaragama untuk Perdamaian	38
F. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	41
3. Setting Penelitian	41
4. Prosedur Pengumpulan Data	43
a. Wawancara	43
b. Dokumentasi	45

5. Teknik Analisis Data	46
G. Sistematika Pembahasan	47
BAB II PEREMPUAN, DIALOG ANTARAGAMA DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	49
A. Perempuan dalam Dialog Antaragama	49
1. Dialog Antaragama	49
2. Peran perempuan dalam dialog antaragama	53
3. Dominasi maskulin dalam dialog antaragama sebagai fenomena global	59
B. FKUB dan Dialog Antaragama di Indonesia	64
1. Sejarah pembentukan FKUB	64
2. Peran strategis FKUB	69
C. Peran FKUB dalam dialog antaragama di Indonesia untuk perdamaian	73

BAB III POSISINALITAS PEREMPUAN DI DALAM STRUKTUR MASKULIN FKUB DI INDONESIA	79
A. Bentuk dan Praktik Dominasi Maskulin dalam FKUB	79
1. Ketimpangan struktur kepengurusan	80
2. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan	83
3. Pembiasan gender dan formalitas program	85
4. Penempatan perempuan di lapisan kedua	91
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya dominasi maskulin di FKUB	95
1. Konstruksi sosial atas relasi laki-laki dan perempuan	95
2. Problem internal di kalangan perempuan FKUB	111
3. Problem internal di kalangan Majelis Agama	120
4. Bias gender dalam pemahaman terhadap ajaran agama	124
5. Ketidakjelasan Peraturan Pemerintah (PBM No 8 dan 9 tahun 2006) dan implementasinya	127
C. Perkembangan Keterlibatan Perempuan dalam FKUB ..	134
1. Meningkat	135

2.	Tetap	136
3.	Menurun	137
4.	Rintisan	138
D.	Dampak Dominasi Maskulin terhadap Perwujudan Kerukunan Antaragama	142
1.	Tidak berpengaruh signifikan	143
2.	Menjadi tantangan	146
3.	Menjadi hambatan serius	150
BAB IV MODALITAS PEREMPUAN DALAM FKUB DAN PERSPEKTIF MEREKA TENTANG GENDER, KEBERAGAMAN DAN INKLUSIVITAS		155
A.	Habitus yang mengonstruksi perempuan di dalam FKUB	155
B.	Telaah Modal perempuan dan penggunaannya di dalam FKUB	174
1.	Modal Sosial	176
a.	Jaringan sosial dan organisasi	176
b.	Aktivitas organisasional keluarga	182
c.	Panggilan berorganisasi sejak dulu	184
2.	Modal Kultural	186
a.	Aspek pendidikan	187
b.	Aspek pekerjaan	188
3.	Modal Simbolik	192
a.	Posisi/jabatan di tempat kerja dan di organisasi	194
b.	Status sosial yang tinggi/ <i>prestise</i>	199
4.	Modal Ekonomi	204
a.	Penghasilan/gaji bulanan	204
b.	Kepemilikan berbagai aset fisik	209
C.	Gender dan Signifikansi Perempuan di FKUB	216
1.	Gender dan Kepemimpinan Perempuan	216
2.	Signifikansi perempuan di FKUB	226
3.	Praktik relasi laki-laki dan perempuan dalam	

FKUB	233
4. Kuota 30 persen perempuan di FKUB	236
D. Keberagaman dan Inklusivitas	246
1. Keberagaman dan perjumpaan dengan yang berbeda agama	248
2. Dialog antaragama dan praktiknya di FKUB	265
a. Dialog ide/kata-kata (<i>head</i>)	272
b. Dialog aksi/karya/praksis (<i>hand</i>)	276
c. Dialog spiritual (<i>heart</i>)	277
AB V NARASI AGENSI PEREMPUAN DI DALAM FKUB: STRATEGI DAN DISTINGSI	281
A. Pola rekrutmen anggota FKUB perempuan	281
1. Relasi dan Komunikasi Personal	281
2. Penugasan fungsional dari lembaga atau instansi	283
3. Penetapan oleh lembaga kepemerintahan	284
4. Perutusan oleh Majelis Agama	285
5. Perutusan oleh organisasi internal agama	287
6. Perutusan oleh ormas keagamaan perempuan	287
B. Tantangan dan Hambatan perempuan di FKUB	291
1. Tantangan-tantangan internal	291
2. Hambatan-hambatan Eksternal	304
C. Strategi agensi perempuan di FKUB	307
1. Komunikasi asertif	308
2. Suportif	310
3. Edukasi	311
4. Suksesif	312
5. Intervensi	314
D. Distingsi perempuan dan laki-laki di dalam FKUB	315
1. Gaya berkomunikasi yang luwes	316
2. <i>Detail oriented skill</i>	317
3. <i>Soft approach</i>	318

BAB VI PENUTUP	327
A. Kesimpulan	327
B. Saran-saran	339
 DAFTAR PUSTAKA	341
LAMPIRAN-LAMPIRAN	366
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	378



DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN
Tabel 1	Data Pengurus FKUB Provinsi
Tabel 2	Data Pengurus FKUB Kabupaten/Kota
Tabel 3	Data Pengurus FKUB Kabupaten/Kota dengan Anggota Laki- Laki Semua
Tabel 4	Faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya dominasi maskulin di FKUB
Tabel 5	Perkembangan Keterlibatan Perempuan dalam FKUB
Tabel 6	Modal yang dimiliki oleh Perempuan Pengurus FKUB
Tabel 7	Proses Rekrutmen Pengurus FKUB Perempuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan yang paling terdampak akibat konflik dan peperangan. Selain kondisi fisik yang lemah, mereka juga tidak bersenjata sehingga sangat mudah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang berkonflik, termasuk pelecehan seksual dan perkosaan. Misalnya konflik dan kerusuhan antaragama di Poso, Sulawesi Tengah (1998-2001), telah mengubah status para perempuan sebagai pengungsi, janda, pencari nafkah dan ibu rumah tangga sekaligus.¹ Demikian juga konflik intra-agama, seperti kekerasan tahun 2010 dan 2011 terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Mataram dan Cikeusik, perempuan mengalami kekerasan karena mereka distigmatisasi, diintimidasi, dan diancam secara fisik melalui penggusuran.² Akan tetapi, perempuan juga memainkan peran signifikan dalam upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Dalam konteks ini, perempuan berkontribusi mencegah eskalasi kekerasan dan memulai proses rekonsiliasi sosial di level akar rumput,³ dan di masyarakat luas.⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

¹ Lian Gogali, *Konflik Poso: Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*, Yogyakarta: Galang Press, 2009, 21 dan Nuhdiatul Huda Mangun, “Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik (Kerusuhan) Poso”, *Jurnal Perempuan*, No 24, (2002): 39. Lihat juga J.B. Banawiratma, dll, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2010), 130.

² Nina Mariani Noor, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution a Case Study on Active Group Resistance in Indonesia*, (Switzerland: Globethics.net, 2017), 128-133.

³ Wiwin Siti Aminah “Perempuan, Dialog, dan Perdamaian Pascakonflik: Pengalaman Institut Mosintuwu”, dalam *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*, editor: Suhadi, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2018), 268.

⁴ Ariel Ehmer, et.al, *Accommodating Identity In Youth Religious Peacebuilding Programs*, (Search for Common Ground, 2017), 20.

Berdasarkan hasil riset, perempuan secara sosial terkondisikan untuk tidak melakukan kekerasan dibandingkan laki-laki, dan cenderung menggunakan dialog dalam memecahkan masalah,⁵ serta memiliki keterampilan negosiasi yang baik.⁶ Misalnya dalam konflik di Ambon, Poso dan Aceh, tidak sedikit perempuan memimpin proses dialog antaragama dan perdamaian di akar rumput, dan perempuan sering berhasil melakukan negosiasi dengan suaminya untuk meletakkan senjata.⁷ Perempuan juga memiliki peran penting di dalam keluarga, dan berpotensi menjadi aktor yang efektif, pembuat keputusan kunci, sekaligus penerima manfaat dari perdamaian.⁸ Contohnya, sebagai ibu dan pendidik utama, perempuan mengajarkan kesetaraan gender, menerapkan pola asuh yang demokratis dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama kepada anak-anaknya. Demikian juga sebagai istri, perempuan dapat memengaruhi suaminya untuk tidak terlibat dalam konflik dan kekerasan.

Perempuan menjadi kekuatan sosial dalam mempromosikan perdamaian dan memiliki kapasitas yang besar untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara tanpa kekerasan. Namun dalam konteks ini, ada juga perempuan yang terlibat dalam konflik dan melakukan kekerasan, bahkan menjadi kombatan yang berada di garis depan dalam pertempuran. Misalnya, dalam konflik Ambon, ada perempuan yang menjadi mata-mata, membantu orang-orang yang berperang, dan turut mengangkat senjata.⁹

⁵ Élise Féron, “Gender and Peace Negotiations Why Gendering Peace Negotiations Multiplies Opportunities for Reconciliation,” dalam *PIN Policy Brief*, (Agustus 2015): 3.

⁶ Kemi Ogunsanya dan Kwezi Mngqibisa, “A Gender Perspective for Conflict Management,” dalam *Occasional Paper*, No. 4, (2000): 2.

⁷ Cate Buchanan (editor), *Pengelolaan Konflik di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, (Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), 12-13

⁸ ASEAN IPR Secretariat, “ASEAN Women Interfaith Dialogue: Promoting Understanding for an Inclusive and Peaceful Society,” Jakarta, November 12-13, (2019): 4-6.

⁹ Lian Gogali, dkk., *Perempuan, Konflik dan Perdamaian: Tuturan Perempuan Korban dan Penyintas Konflik dan Perdamaian di Poso, Ambon dan*

Namun demikian, dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan pembangunan perdamaian pada skala yang lebih besar, perempuan seringkali dikecualikan dari peran-peran penting sebagai fasilitator dan pembangun perdamaian¹⁰ dan tidak terlihat dalam perjanjian-perjanjian perdamaian.¹¹ Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari posisi mereka yang tidak setara dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, komunitas, dan ruang publik.¹² Laki-laki dan pengaruhnya ada di mana-mana dalam konflik dan proses perdamaian, karena mayoritas mereka sebagai kombatant, pemimpin militer dan politik, diplomat, negosiator, mediator, dan tokoh media.¹³ Oleh karena itu, kebanyakan pembahasan dan pengambilan keputusan tentang masalah perdamaian dan keamanan dilakukan oleh, untuk, dan tentang laki-laki. Namun demikian, laki-laki yang dimaksud di sini adalah laki-laki dalam narasi dominan, khususnya dalam konteks konflik.¹⁴

Dalam wacana dialog antaragama, perempuan umumnya kurang terwakili. D'Souza menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dialog antaragama kurang menonjol karena perempuan belum terwakili secara signifikan dalam hierarki lembaga keagamaan dan kehadiran mereka dianggap minim atau bahkan tidak relevan.¹⁵ Dialog antaragama di antara para pemimpin laki-laki tersebut terkait erat dengan keistimewaan laki-laki dalam hal kekuasaan dan dominasi.¹⁶

Atambua, (Kupang: JPIT, 2021), 256-260. Lihat juga Buchanan (editor), *Pengelolaan Konflik di Indonesia*, 17 dan 25.

¹⁰ Ogunsanya and Mngqibisa, “A Gender Perspective, 1.

¹¹ Nijole Petkeviciute dan Dalia Streimikiene, “Gender and Sustainable Negotiation,” *Economics & Sociology*, 10, 2, (2017): 287.

¹² ASEAN IPR Secretariat, “ASEAN Women,” 10.

¹³ John Newman, ed., *Masculinities, Conflict and Peacebuilding: Perspectives on Men Through A Gender Lens*, (Saferworld, 2014). 1.

¹⁴ Lihat Rahel Kunz, Henri Myrtiny & Wening Udasmoro, “Preachers, pirates and peace-building: Examining non-violent hegemonic masculinities in Aceh,” *Asian Journal of Women’s Studies*, Vol. 24, No. 3, (2018): 314-316.

¹⁵ Diane D'Souza, “Gendered Perspectives on Interfaith Dialogue,” makalah dipresentasikan dalam *Consultation Ecclesia of Women in Asia: Voices of the Silenced di Bangkok*, (November 2002): 8-9.

¹⁶ Jeannine Hill Fletcher, “Women in Inter-Religious Dialogue,” dalam *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue*, ed. Catherine Cornille, (West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013), 169-170.

Alison Stuart menyimpulkan bahwa institusi keagamaan secara keseluruhan adalah institusi patriarki yang didominasi oleh laki-laki, terutama dalam posisi kepemimpinan dalam struktur keagamaan formal.¹⁷ Abu-Nimer menegaskan bahwa dalam penciptaan perdamaian antaragama, mayoritas program dan organisasi yang terlibat tetap didominasi oleh laki-laki, baik dalam perspektif maupun representasi.¹⁸ Bahkan semua agama di dunia saat ini mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial masyarakat.¹⁹ Tidak heran jika lembaga-lembaga seperti Religion for Peace secara historis hanya memiliki sedikit perempuan dalam posisi kepemimpinan.²⁰ Patut dicatat bahwa hegemoni laki-laki dalam dialog antaragama tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Barat sekalipun.

Sejak tahun 1990-an, di kalangan masyarakat sipil telah muncul gerakan dialog lintas-SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang disebut Th. Sumartana sebagai “kecambah *civil society* di Indonesia.”²¹ Di antara beragam organisasi tersebut ada yang fokus pada upaya dialog antaragama atau menjadikan dialog sebagai bagian dari agenda yang lebih besar atau organisasi keagamaan.²² Misalnya, Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia -INTERFIDEI (1991),

¹⁷ Alison Stuart, “Freedom of Religion and Gender Equality: Inclusive or Exclusive?” dalam *Human Rights Law Review* 10, (Oxford University Press, 2010), 439. Lihat juga Ghazala Mir, John Lawler dan Mary Godfrey, “Chapter Heading Women, Faith and Social Cohesion: Models for Building Cohesive Communities,” Laporan Penelitian oleh Joseph Rowntree Foundation, (Juli, 2010): 4 dan World Faiths Development Dialogue, *Interfaith Journeys An exploration of history, ideas, and future directions*, (February 2017), 44-45.

¹⁸ Mohammed Abu-Nimer, “Religion and Peacebuilding: Reflections on Current Challenges and Future Prospects,” dalam *Journal of Interreligious Studies*, Issue 16, (March 2015): 22-23.

¹⁹ Kamila Klingorová and Tomáš Havlíček, “Religion and Gender Inequality: The Status of Women in the Societies of World Religions, *Moravian Geographical Reports*, 23, 2, (2015): 3.

²⁰ World Faiths Development Dialogue, *Interfaith Journeys*, 61.

²¹ Trisno S. Sutanto, “Negara, Kekuasaan, dan “Agama” : Membedah Politik Perukunan Rezim Orba,” dalam Zainal Abidin Bagir, dkk. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), 147.

²² Banawiratma, dll, *Dialog Antarumat*, x.

Lembaga Kajian Islam Sosial - LKIS (1992), Masyarakat Dialog Antaragama-MADIA (1995), Indonesian Conference on Religion and Peace - ICRP (2001), Lembaga Antar-Iman Maluku untuk Kemanusiaan (eLaIeM) (2003),²³ dan lain-lain. Gerakan tersebut semakin subur menjelang dan setelah era Reformasi dengan berdirinya beragam komunitas dan organisasi lintas agama di berbagai tempat di Indonesia.

Selain masyarakat sipil, pemerintah juga telah memberi perhatian pada upaya dialog antaragama, misalnya Kemendagri (Kesbangsol), dan khususnya melalui Departemen Agama/Kementerian Agama yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan agama. Di era Reformasi, Kemenag bahkan menjadi satu-satunya kementerian yang dipertahankan memiliki struktur dari pusat hingga daerah (Kabupaten/Kota). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengaturan kehidupan beragama di masyarakat. Akan tetapi, konsep dan program yang dikembangkan oleh pemerintah kurang efektif, bahkan kadang kontraproduktif.

Pada era Orde Baru, pemerintah membentuk lembaga seperti Badan Kontak Antaragama (BKA) tahun 1967, Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) tahun 1979 dan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) tahun 1993. Selama periode tersebut, pemerintah mengelola masalah antar umat beragama dengan cara-cara opresif untuk menekan konflik dan menggunakan pendekatan *top-down* dalam menangani masalah di masyarakat atas nama "stabilitas politik" dan pembangunan.²⁴ Karena itu, tidak mengherankan jika pada era Orde Baru ketegangan antar umat beragama meningkat dan mencapai puncaknya menjelang Reformasi dengan terjadinya konflik dan kekerasan di berbagai wilayah, misalnya di Ambon, Poso dan Singkawang.

²³ *Ibid.*, 52-56.

²⁴ Achmad Munjid, "Building a Shared Home: Investigating the Intellectual Legacy of the Key Thinkers of Inter-religious Dialogue in Indonesia", *Disertasi* pada Temple University, Philadelphia, (2014), 55.

Namun demikian, pasca Reformasi terjadi perubahan pendekatan pemerintah dari *top-down* menjadi *bottom up*, melalui pengembangan dialog multikultural dan kerja sama antaragama untuk kemanusiaan. Demikian juga pelibatan masyarakat lebih banyak dan pemberian porsi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi atau menangani konflik.²⁵ Di Kementerian Agama (Kemenag), program-program kerukunan antaragama ditangani dan dikelola oleh dua institusi, yakni Badan Litbang dan Diklat Kemenag yang mengurusi perencanaan kebijakan-kebijakan kerukunan antaragama dalam bentuk kegiatan riset dan pelatihan, dan pada tataran praktis lapangan dibentuklah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada tahun 2001 di bawah Sekretariat Jendral Kemenag yang mengoperasikan program-program kerukunan antaragama.²⁶

Pada tahun 2006, Kemenag kemudian memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (selanjutnya disebut PBM). Kehadiran FKUB menjadi rekan utama PKUB di setiap daerah di Indonesia, karena FKUB bukan lembaga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, tetapi “lembaga yang dibentuk oleh para pemuka agama yang mempunyai kewenangan tersendiri berdasarkan kebijaksanaannya untuk memutuskan program kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing.”²⁷

Kehadiran FKUB diharapkan dapat mendorong praktik dialog di kalangan masyarakat. FKUB menjadi ruang bagi para pemuka agama untuk saling bertemu dan mengenal satu sama lain, dan menghadapi masalah umat beragama secara bersama-sama. Akan tetapi dalam kenyataannya, belum semua FKUB berperan baik. Dalam beberapa kasus, alih-alih merukunkan umat beragama, FKUB justru

²⁵ Banawiratma, dll, *Dialog Antarumat*, 72-74.

²⁶ *Ibid.*, 75-78.

²⁷ *Ibid.*, 85

menghambat kerukunan antaragama,²⁸ termasuk penghambat utama dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah, seperti dilaporkan oleh CRCS-UGM, SETARA, The Wahid Institute, dan lain-lain.²⁹

Meskipun demikian, eksistensi FKUB tetap signifikan dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan karena orientasi hubungan antaragama dalam FKUB terarah pada komunikasi dan kerja sama yang lebih jujur.³⁰ Husni Mubarok menyebut FKUB memiliki posisi yang strategis³¹ dalam menumbuhkan perdamaian di masyarakat melalui tugas utamanya memfasilitasi dialog antaragama. FKUB dipandang mampu menjembatani dialog antaragama di masyarakat dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah. FKUB juga menjadi pemberi rekomendasi sebuah rumah ibadah boleh didirikan atau tidak. FKUB, bersama pemerintah daerah dan Kemenag, juga berperan sebagai fasilitator dalam menjamin kebebasan beribadah bagi warga negara,³² dan sebagai mediator dalam konflik dengan mencari solusi bersama yang tidak melanggar hak konstitusional masing-masing.³³

Berdasarkan data dari Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia, FKUB telah terbentuk di 34 Provinsi dan 509 FKUB Kabupaten/Kota.³⁴ Jika rata-rata anggota FKUB Provinsi 21 orang dan anggota FKUB Kabupaten/Kota 17 orang, maka diperkirakan total jumlah anggota FKUB seluruh Indonesia adalah lebih dari 9.000 orang. Jangkauan

²⁸ Ihsan Ali Fauzi, dkk., *Kontroversi Gereja di Jakarta*, (Yogyakarta; CRCS, 2011), 111.

²⁹ Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk., *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Yogyakarta: CRCS, 2015), 7.

³⁰ Banawiratma, dll, *Dialog Antarumat*, 48.

³¹ Husni Mubarok, “Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” dalam *Dialog*, 37, 2. (December 2014): 197-198.

³² Suhadi, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2008), 31.

³³ Zainal Abidin Bagir, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2012*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2013), 27-28.

³⁴ <https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub>, diakses pada 27 Agustus 2021.

yang luas tersebut menjadikan FKUB sebagai kekuatan besar dalam upaya menciptakan kerukunan antaragama di Indonesia.

Terkait dengan konsep kerukunan, PBM Pasal 1 mendefinisikan kerukunan antaragama sebagai “keadaan hubungan antar umat beragama berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai persamaan dalam mengamalkan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Definisi kerukunan ini masih menyisakan masalah. Ihsan Ali Fauzi, dkk, memandang definisi ini tidak lengkap karena tidak membahas kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan.³⁵ Dengan bahasa lain Hefner menyebut komitmen negara bagi kerukunan agama menafikan komitmen bagi kebebasan beragama yang lebih pluralistik.³⁶ Namun demikian, peneliti setuju dengan pendapat Zainal Abidin Bagir bahwa konsep kerukunan dan kebebasan sesungguhnya saling terkait, meskipun keduanya jelas berbeda, bahkan dipertentangkan.³⁷

Konsep kerukunan, sebagai paradigma dominan dalam pengelolaan kehidupan beragama, yang dikembangkan sejak tahun 1967 sampai saat ini, memang masih mendapatkan banyak kritik. Menurut Trisno, kerukunan dan “politik perukunan” sejak masa Orde Baru belum banyak berubah hingga kini. “Politik kerukunan” (*harmonising politics*) yang dimaksud yakni “kerukunan yang didefinisikan, diterapkan, dijaga oleh dan demi langgengnya rezim kekuasaan negara.”³⁸ Hal tersebut tercermin dalam Rancangan

³⁵ Ihsan Ali-Fauzi, dkk., *Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB*, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2018), 6. Lihat juga Zainal Abidin Bagir, dkk., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: CRCS, 2019), 101.

³⁶ Robert Hefner dan Ihsan Ali Fauzi, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi*, (Yogyakarta: CRCS, 2014), 33.

³⁷ Zainal Abidin Bagir, *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, (Yogyakarta: CRCS, 2017), 8.

³⁸ Trisno S. Sutanto, “Negara, Kekuasaan, dan “Agama”, 117.

Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) yang disusun pada 2003 oleh Kemenag. Menurut Trisno, kelemahan konsep kerukunan karena model kerukunan yang dibangun didasarkan pada “paradigma pembinaan,” di mana elite dan umat menjadi obyek binaan sehingga hasilnya “kerukunan semu.”³⁹ Selain itu, konsep kerukunan dilandasi oleh kondisi darurat (“sisa-sisa G-30S/PKI”) dan perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang dipandang sebagai ancaman disintegrasi bangsa, sehingga tabu untuk dibicarakan secara terbuka.⁴⁰ Padahal untuk membangun dialog, keragaman SARA perlu dilihat sebagai kekuatan dan oleh karenanya harus didiskusikan dan dialami.

Banawiratma, dkk, memandang program dialog antaragama era Orde Baru berorientasi pada kerukunan dengan membatasi ekspresi perbedaan dan menomorsatukan persatuan demi pembangunan.⁴¹ Konsep trilogi kerukunan yang digagas Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara, dan dilanjutkan oleh Munawwir Syadzali juga tidak terlepas dari “konsep penyeragaman Orde Baru demi stabilitas nasional di mana perbedaan dianggap sebagai potensi konflik yang mengancam program pembangunan.”⁴² Pada titik inilah, masyarakat sipil kemudian merespons “politik kerukunan” dari pemerintah yang dipandang kurang berhasil tersebut dengan beragam inisiatif dialog antaragama yang menekankan kerja sama antaragama, selain memahami doktrin-doktrin keagamaan.

Sebagian besar organisasi yang mempunyai program dialog antaragama, termasuk di FKUB, beroperasi dengan asumsi ada dinamika kuasa yang seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan sehingga suara laki-laki dan perempuan sama-sama terdengar dan didengarkan. Namun dalam praktiknya, hal ini jauh dari kenyataan. Berdasarkan pengalaman peneliti dalam berbagai aktivitas dialog antaragama sejak akhir 1998, khususnya sebagai anggota FKUB Provinsi DIY sejak 2014 sampai sekarang, peneliti

³⁹ *Ibid.*, 133.

⁴⁰ *Ibid.*, 147

⁴¹ Banawiratma, dll, *Dialog Antarumat*, 43.

⁴² *Ibid.*, 45.

menyaksikan langsung perempuan masih sangat minim terlibat atau dilibatkan dalam dialog antaragama dan melihat konsekuensinya. Peneliti menemukan rata-rata anggota FKUB adalah 92 persen laki-laki dan 8 persen perempuan.⁴³ Data ini menunjukkan adanya gap yang sangat lebar antara laki-laki dan perempuan di FKUB. Beberapa penelitian tentang FKUB juga menunjukkan persentase keterlibatan perempuan di FKUB sangat kecil⁴⁴ dan bahwa FKUB merupakan lembaga yang didominasi “laki-laki.”⁴⁵

Ketimpangan yang lebar antara laki-laki dan perempuan di FKUB tidak muncul secara kebetulan, melainkan di baliknya terdapat struktur-struktur yang berkontribusi terhadap lahirnya kesenjangan tersebut. Salah satunya struktur dan praktik dominasi maskulin⁴⁶ yang dipupuk secara kultural, politis, dan teologis.⁴⁷

⁴³ Wiwin Siti Aminah Rohmawati, “The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB), *The Muslim World*, Vol. 110, (Autumn 2020): 581.

⁴⁴ Mubarok, “Memperkuat Forum,” 201.

⁴⁵ Nawari Ismail, “Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat,” *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, (2016): 156-157.

⁴⁶ Kata maskulin (*masculine*) berasal dari bahasa Latin yaitu *masculinus* dari *masculus* yang berarti laki-laki. Kata *masculine* merupakan kata benda yang bermakna laki-laki, dan kata sifat yang bermakna memiliki kualitas atau penampilan yang secara tradisi dikaitkan dengan laki-laki atau jantan. Kebalikan dari maskulin adalah feminin (*feminine*) juga berasal dari bahasa latin yaitu *femininus* dari kata *femina* yang bermakna perempuan. Feminin merupakan kata benda yang berarti perempuan dan kata sifat yang berarti memiliki kualitas atau penampilan yang biasanya secara tradisional dihubungkan dengan perempuan, terutama kelembutan dan kecantikan. Oxford Dictionaries, ‘Masculine’ diunduh dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/masculine>, Merriam Webster, ‘Masculine’ diunduh dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/masculine>, diakses 8 Agustus 2023. Dan Oxford Dictionaries, ‘Feminine’ diunduh dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/feminine>, diakses 8 Agustus 2023.

⁴⁷ Rohmawati, “The Role of Women in Interreligious Dialogue, 587.

Dominasi maskulin⁴⁸ yang pada gilirannya akan memunculkan maskulinitas hegemonik⁴⁹ di dalam FKUB, secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada kurang efektifnya fungsi dan peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan antaragama di Indonesia. Karena maskulinitas hegemonik, yang melegitimasi dominasi laki-laki dan membenarkan subordinasi perempuan di dalam masyarakat, berkontribusi signifikan terhadap lahirnya gap yang lebar antara laki-laki dan perempuan di dalam FKUB.

Oleh karena itu, menjadi menarik dan penting untuk meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap adanya gap lebar tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perwujudan dialog antaragama dan perdamaian di masyarakat. Lebih lanjut, penting juga untuk mengkaji tentang agensi perempuan yang menjadi anggota FKUB di tengah institusi yang maskulin ini.

Topik tentang FKUB telah banyak dibahas oleh para sarjana. Namun kajian mereka sebagian besar berkaitan dengan peran dan fungsi FKUB dalam mewujudkan kerukunan antaragama di masyarakat. Mayoritas kajian mereka juga dilakukan dalam konteks lokal.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, terdapat tiga kegelisahan akademik mendalam dalam penelitian ini, di mana ketiganya saling berkaitan satu sama lain. *Pertama*, fenomena gap sangat lebar antara laki-laki dan perempuan di FKUB sangat kontras dengan gerakan kesetaraan gender yang sudah diperjuangkan di Indonesia sejak tahun 80-an. Gerakan feminis di Indonesia tentu belum memberikan dampak signifikan dalam masyarakat, khususnya dalam organisasi keagamaan, untuk mengakhiri subordinasi dan

⁴⁸ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin*, (La Domination Masculine), penerjemah Stephanus Aswar Herwinarko, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010). 43.

⁴⁹ R.W. Connell, *Gender and Power*, (California: Stanford University Press, 1987), 183 dan R.W. Connell, “Understanding Men: Gender Sociology and the New International Research on Masculinities,” makalah dipresentasikan pada Clark Lecture, University of Kansas, 19 September, (2004). Lihat juga R. W. Connell dan James W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity Rethinking the Concept,” *Gender & Society*, Vol. 19 No. 6, (Desember 2005): 832.

diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu penting untuk mengkaji struktur sosial yang menyebabkan fenomena tersebut muncul, termasuk aturan mengenai FKUB dan praktik ber-FKUB.

Kedua, meski keterlibatan perempuan di arena publik di Indonesia semakin meningkat, namun norma gender tradisional masih berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini, termasuk dalam institusi-institusi keagamaan. Namun demikian, dalam realitasnya ternyata ada juga perempuan yang dilibatkan dalam FKUB. Oleh karena itu penting untuk mengkaji agensi perempuan dalam konteks FKUB yang didominasi laki-laki.

Ketiga, suara-suara dan pengalaman perempuan sebagian besar kurang terdengar dalam isu dialog antaragama, khususnya di FKUB. Demikian juga, perempuan sebagai agen yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian melalui dialog antaragama di masyarakat kurang mendapat perhatian. Pada titik inilah peneliti memandang penting untuk menyusun secara sistematis narasi terkait dengan agensi perempuan sekaligus peran strategis mereka dalam mewujudkan dialog antaragama melalui FKUB.

B. Rumusan Masalah

Posisi FKUB yang strategis dalam menciptakan kerukunan antaragama dan perdamaian di Indonesia bertolak-belakang dengan realitas wajah FKUB yang sangat maskulin dan sangat minimnya perempuan terlibat atau dilibatkan baik sebagai pengurus maupun sebagai penerima manfaat dari program-program FKUB. Hal tersebut berakibat pada kurang efektifnya peran dan fungsi FKUB, dan dengan demikian dampaknya menjadi kurang signifikan terhadap perwujudan kerukunan dan perdamaian di masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

Pertama, struktur apa yang berkontribusi terhadap minimnya perempuan dalam FKUB dan konsekuensinya bagi dialog antaragama di Indonesia?

Kedua, bagaimana agensi para perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang gender, keberagaman dan inklusivitas?

Ketiga, bagaimana strategi agensi para perempuan di dalam struktur FKUB yang didominasi struktur maskulin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa dengan memahami struktur yang menyebabkan lahirnya gap lebar antara laki-laki dan perempuan di dalam FKUB, struktur yang timpang tersebut butuh dan dapat diubah menjadi seimbang, bahkan adil gender. Lebih jauh, dengan mengungkap agensi, strategi dan distingsi perempuan di FKUB yang berwajah sangat maskulin, maka pengalaman, pergumulan dan perjuangan mereka dapat menjadi sumber pengetahuan. Demikian juga, dengan menarasikan secara kritis terkait dengan perspektif dan karya para perempuan anggota FKUB dalam isu gender, keberagaman dan inklusivitas, maka suara mereka, sebagai kelompok minoritas, dapat terdengar dalam wacana kontemporer perempuan, dialog antaragama dan perdamaian di Indonesia dan *beyond*.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berguna untuk: (1) Memberikan sumbangan teori pada kajian ilmu sosiologi, khususnya terkait dengan isu perempuan, dialog antaragama dan perdamaian di Indonesia dan di Asia Tenggara. (2) Memberikan pengetahuan tentang bagaimana perempuan, dengan agensinya, menggunakan strategi dan distingsi mereka dalam konteks FKUB yang didominasi oleh laki-laki dan maskulin. (3) Memberikan wawasan tentang fenomena adanya gap yang sangat lebar antara laki-laki dan perempuan dalam FKUB, struktur yang berkontribusi terhadap femomena tersebut dan dampaknya terhadap dialog antaragama dan perdamaian di Indonesia.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap: (1) Pengembangan paradigma baru tentang urgensi kesetaraan gender dalam isu dialog antaragama, khususnya di FKUB. Perempuan patut diberi peluang yang sama (*equal opportunity*) dengan laki-laki dalam FKUB, karena laki-laki maupun perempuan sama-sama sebagai agen penting dalam menciptakan dan menjaga kerukunan dan perdamaian di masyarakat

melalui dialog antaragama. (2) Pentingnya menemukan struktur-struktur yang berkontribusi terhadap adanya kesenjangan yang lebar antara laki-laki dan perempuan dalam FKUB. Dengan demikian, memungkinkan tumbuhnya kesempatan dan ruang yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam dialog antaragama, khususnya di FKUB, di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Telah banyak studi yang memfokuskan kajian pada isu dialog antaragama dan perempuan atau gender. Helene Egnell (2002)⁵⁰ menyoroti tentang dialog antaragama yang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki dan isu gender jarang menjadi agenda, terutama di tingkat resmi. Egnell menyimpulkan bahwa teologi feminis mengandung sumber daya yang dapat meningkatkan dialog antaragama. Diane D'Souza (2002)⁵¹ yang mengkaji pengalaman perempuan lintas agama dalam program “Women’s Interfaith Journey” menyimpulkan bahwa perempuan menemukan cara lain untuk melakukan dialog antaragama, yakni fokus pada masalah pribadi atau komunitas, dan melibatkan diri secara emosional dan relasional.

Ursula King (2007)⁵² menyimpulkan sangat sedikitnya perempuan terlibat dalam dialog antaragama disebabkan masih adanya marginalisasi, *invisibility* dan *exclusion* terhadap perempuan. King menggambarkan kebanyakan dialog antaragama mirip dengan “dialog tuli,” yang berkontribusi pada kurang efektifnya dialog dan manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat secara luas karena tidak didengarnya suara perempuan. Sementara itu Ghazala Mir, dkk

⁵⁰ Helene Egnell, “Dialogue for Life – Feminist Approaches to Interfaith Dialogue,” dalam Karin Sarja, dkk., *Gender, Poverty and Church Involvement*, laporan dari Konferensi Penelitian di Uppsala, 6-8 Mei 2002, (Electronic Publishing Center, Uppsala University, 2002), 113-120.

⁵¹ D'Souza, “Gendered Perspectives on Interfaith Dialogue.”

⁵² Ursula King, “Gender and Interreligious Dialogue”, *East Asian Pastoral Review*, Vol. 44, No. 1, (2007).

(2010)⁵³ yang meneliti peran perempuan dan kelompok agama dalam membangun kohesi sosial di Inggris menemukan bahwa meski terbukti perempuan berperan sentral dalam resolusi konflik di masyarakat, namun suara mereka biasanya absen dari proses pengambilan keputusan, baik di komunitas agamanya sendiri maupun di komunitas lintas agama.

Penelitian Banawiratma, dkk (2010)⁵⁴ tentang macam-macam bentuk praktik dialog antaragama di Indonesia menggarisbawahi adanya diskriminasi gender yang seringkali berjalin berkelindan dengan diskriminasi agama. Narasi gender dan kekerasan terhadap perempuan juga seringkali dipicu oleh tafsir agama yang masih menomorduakan perempuan. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak gerakan perempuan mengeksplorasi dialog antaragama dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan posisi ini, keterlibatan perempuan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan dialog antaragama harus ditingkatkan, karena partisipasi perempuan akan banyak memengaruhi wujud kerukunan umat beragama dan masa depan masyarakat Indonesia.

Fletcher (2013)⁵⁵ meneliti peran dan tantangan perempuan dalam dialog antaragama dengan menggunakan tiga model dialog sebagai pisau analisis, yakni Model Parlemen, Model Aktivis dan Model Mendongeng atau Dialog Sehari-hari. Menurut Fletcher, dalam model pertama, jika perempuan terlatih dalam metodologi feminis, ia dapat mengungkap struktur-struktur yang mensubordinasi dan menindas perempuan, dan membawa perspektif baru ke dalam meja dialog. Dalam model kedua, keterlibatan perempuan terjadi di banyak tempat di seluruh dunia, tetapi tidak didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam model ketiga, yang memandang keseharian

⁵³ Ghazala Mir, John Lawler and Mary Godfrey, "Chapter Heading Women, Faith and Social Cohesion: Models for Building Cohesive Communities," a Report Research by Joseph Rowntree Foundation, (July 2010).

⁵⁴ Banawiratma, dll, *Dialog Antarumat Beragama:...*

⁵⁵ Jeannine Hill Fletcher, "Women in Inter-Religious Dialogue," dalam *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue*, ed. Catherine Cornille, (West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013)

kehidupan manusia sebagai dialog, perempuan diakui memiliki minat besar pada pengalaman sehari-hari dengan mitra dialognya.

Penelitian Nelly van Doorn (2014)⁵⁶ menyimpulkan adanya dikotomi peran perempuan dalam dialog antaragama dan antarbudaya. Di semua negara, banyak perempuan terlibat dalam dialog, namun mereka tetap tidak terlihat dan suaranya dibayangi oleh suara laki-laki. Penyebabnya perempuan masih menghadapi perilaku bias gender di dalam komunitasnya, yang kemudian dibawa ke dalam forum dialog. Perempuan jarang diundang ke pertemuan-pertemuan antaragama atau pembangunan perdamaian, padahal UNICEF menyatakan bahwa pejabat perempuan cenderung lebih efisien dan mendorong kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Penyebabnya perempuan cenderung menganggap kontribusinya lebih rendah dibanding laki-laki, yang mengakibatkan posisi, peran dan kontribusi perempuan tetap tidak terlihat. Penelitian ini mengeksplorasi agensi perempuan dalam dialog antaragama, namun tidak menyebutkan tentang peran perempuan di FKUB.

Mohammad Abu-Nimer (2015)⁵⁷ dalam karya reflektifnya menemukan tujuh problem utama dalam isu agama dan pembangunan perdamaian, salah satunya terkait dengan pengarusutamaan gender. Menurutnya, ada tiga penyebab representasi perempuan sangat kurang dalam dialog antaragama. *Pertama*, lembaga keagamaan sendiri secara struktural masih didominasi laki-laki; *Kedua*, dialog antaragama sering diartikan sebagai ruang untuk membicarakan masalah politik yang oleh sebagian besar norma sosial dipandang sebagai domain laki-laki; *Ketiga*, beberapa donor swasta dan pemerintah yang mendukung pembangunan perdamaian antaragama

⁵⁶ Nelly van Doorn-Harder, “Women's Agency and Role in Inter-Religious Dialogue Indonesia - the Netherlands,” dalam *Muslim Christian Relations Observed Comparative Studies from Indonesia and the Netherlands*, Eds. Volker Kilster and Robert Setio, (Leizig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH, 2014), 213-221.

⁵⁷ Mohammed Abu-Nimer, “Religion and Peacebuilding: Reflections on Current Challenges and Future Prospects,” dalam *Journal of Interreligious Studies*, Issue 16, (March 2015).

tidak mengarusutamakan suara perempuan dalam program-program yang mereka dukung.

Penelitian John Fahy dan Jan-Jonathan Bock (2018)⁵⁸ tentang gerakan dialog antaragama di Delhi, Doha dan London menemukan bahwa isu antaragama di Delhi sangat apolitis dan inisiatif antaragama masih berpusat pada dialog formal dan didominasi oleh laki-laki. Dari perbandingan terhadap tiga kota tersebut, mereka menemukan bahwa meskipun ada pengakuan luas akan perlunya lebih banyak aksi sosial berbasis akar rumput, tetapi dialog antaragama masih mengutamakan model dialog formal yang elitis dan terputus dari problem masyarakat.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa dialog antaragama di dunia kebanyakan dilakukan dengan model dialog formal dan didominasi oleh laki-laki. Beragam penelitian di atas sama sekali tidak menyinggung FKUB yang menjadi fokus penelitian ini. Namun demikian, karya-karya tersebut menjadi rujukan penting dalam menggambarkan tren *malestream* dialog antaragama di dunia, termasuk di Indonesia.

FKUB secara umum telah dikaji dalam banyak penelitian. Misalnya Imam Sopyan dan Ahmad Khoirul Fata (2020)⁵⁹ yang meneliti peran FKUB dalam wacana kerukunan antaragama di Indonesia, menyoroti FKUB lebih memilih kondisi yang harmonis daripada perubahan dan pertumbuhan sikap dan keterlibatan nyata di antara umat beragama, di mana hal ini terkait dengan status FKUB yang disponsori negara sehingga tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dan kepentingan negara. Hasil penelitian A. Salim Ruhana (2009)⁶⁰ menyatakan bahwa FKUB merupakan wadah baru yang lebih jelas dan terukur, baik dari segi komposisi keanggotaan, tugas dan wewenang, serta output yang dihasilkan. FKUB juga ‘dijamin’

⁵⁸ John Fahy & Jan-Jonathan Bock, *Beyond Dialogue? Interfaith Engagement in Delhi, Doha & London*, (Georgetown University in Qatar, 2018)

⁵⁹ Imam Sopyan, dan Ahmad Khoirul Fata, “Religious Harmony, Godly Nationalism, and The Limits of State-Sponsored Interreligious Dialogue Agenda In Indonesia,” *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 6, Nomor 2, (Desember 2020), 31-53.

⁶⁰ A. Salim Ruhana, “FKUB sebagai Forum Kerja sama Antarumat Beragama,” *Harmoni*, Vol. VIII (April-June, 2009): 80-91

keberlangsungannya karena disediakan anggaran oleh negara seperti disebutkan dalam Pasal 25 dan 26 PBM. Penelitian ini menemukan bahwa secara kualitatif, peran FKUB dalam memelihara kerukunan antaragama masih belum cukup maksimal dan optimal.

Muhammad Anang Firdaus (2014)⁶¹ dalam risetnya tentang eksistensi FKUB dalam memelihara kerukunan antaragama di Indonesia memetakan kinerja FKUB ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, FKUB telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur; *kedua*, FKUB telah berjalan tetapi kurang memperoleh dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Jawa Barat; *ketiga*, FKUB kurang berjalan dan kurang memperoleh dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah, seperti: Bengkulu, dan Papua.

Kajian tentang FKUB dengan studi kasus di daerah-daerah tertentu juga telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Iman Fadhilah (2021)⁶² meneliti tentang peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Tengah. Disertasi ini menyebutkan faktor penyebab konflik keagamaan menurut FKUB Jawa Tengah, yakni bersifat kegamaan dan non keagamaan yang kemudian menyeret isu agama ke dalamnya. Menurutnya, FKUB Jawa Tengah berpandangan bahwa konflik-konflik keagamaan di Jawa Tengah terjadi salah satunya karena ketidakdewasaan dalam beragama. Oleh karena itu, isu kedewasaan beragama perlu disuarakan secara nasional.

Hasil penelitian Muhammad Idris (2013)⁶³ tentang peran FKUB Sulawesi Utara dalam memelihara kerukunan antaragama di Manado

⁶¹ Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” *Kontekstualita*, Vol. 29, No. 1, (2014): 58-71.

⁶² Iman Fadhilah , “Konflik Keagamaan: Studi Terhadap Posisi FKUB Dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan Di Jawa Tengah”, *Disertasi* pada Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (2020).

⁶³ Muhammad Idris, Ikrar, Ikmal, “Peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama di Manado,” Laporan Penelitian Kompetitif SATIN Manado, (2013).

menyatakan bahwa peran FKUB Sulut sebagai fasilitator, mediator dan komunikator dari pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan dialog, penampungan dan penyaluran aspirasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung peran-peran tersebut berfungsi adalah adanya semboyan *Torang Samua Basudara* yang membuat masyarakat Manado terbuka dalam interaksi sosial, dan dukungan pemerintah daerah yang besar dan intensif.

Sementara itu, Nova Dwiyanti (2016)⁶⁴ dalam risetnya tentang peran komunikasi pengurus FKUB dalam mencegah konflik antaragama di Kota Batam menyimpulkan bahwa FKUB merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik antaragama. Metode komunikasi yang digunakan pengurus FKUB Kota Batam dalam mengantisipasi konflik adalah dengan melakukan pemantauan dan penyuluhan keagamaan kepada masing-masing komunitas, bekerja sama dengan pemerintah daerah, polisi dan mendekati organisasi keagamaan yang ada.

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas, belum ada yang fokus membahas perempuan dalam FKUB. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang di dalamnya menyuguhkan tentang perempuan dalam FKUB. Penelitian Nawari Ismail (2016)⁶⁵ menemukan bahwa meskipun FKUB NTB dan Mataram telah cukup melaksanakan perannya, namun intensitas dan sebarannya masih sangat terbatas. Beberapa kendala ditemukan, di antaranya adalah kegiatan-kegiatannya masih terlalu fokus pada generasi tua, kaum laki-laki, dan pada dialog ide. Oleh karena itu, perlu memperluas pelibatan generasi muda dan perempuan, dan ruang lingkup kerjanya lebih banyak pada dialog aksi. Sementara itu, Husni Mubarok (2014)⁶⁶ yang mengkaji posisi dan peran strategis FKUB dalam mewujudkan kerukunan

⁶⁴ Nova Dwiyanti, "Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam Mencegah Konflik Antar Umat Beragama Di Kota Batam," *DIMENSI*, Vol. 6, NO. 3, (November 2017): 491-502.

⁶⁵ Nawari Ismail, "Menggantung Asa kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Nusa Tenggara Barat" (*Prosiding Konferensi Nasional 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah*): 157.

⁶⁶ Mubarok, "Memperkuat Forum," 201.

antaragama di Indonesia, menyoroti sejumlah masalah yang melemahkan FKUB. Salah satunya terkait dengan komposisi perempuan yang terlampaui sedikit di FKUB, yang berdampak pada posisi strategis FKUB yang tidak berguna. Kedua penelitian ini tidak secara khusus menganalisis bagaimana peran perempuan di FKUB.

PUSAD Paramadina (2020)⁶⁷ melakukan penelitian yang diterbitkan dengan judul *Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran FKUB: Temuan dari Pangkalan Data*. Salah satu bagian penting yang dihasilkan dari penelitian ini adalah adanya ketimpangan yang besar terkait dengan proporsi pengurus FKUB menurut jenis kelamin, di mana laki-laki 92 persen dan perempuan 8 persen. Angka ini juga menggambarkan kecenderungan yang terjadi di majelis-majelis agama. Riset ini tidak menggali lebih jauh tentang faktor-faktor yang menyebabkan gap besar tersebut dan bahasan tentang perempuan tidak mencakup semua aspek.

Hasil telaahan atas karya-karya para penulis dan peneliti tersebut di atas menunjukkan tidak ada karya yang berfokus pada tema FKUB dan perempuan. Penelitian ini menjadi penting dan signifikan karena selain belum ada yang mengulas secara detail tentang peran perempuan dalam FKUB, juga belum ada yang meneliti secara mendalam tentang agensi perempuan di FKUB. Disertasi ini mencoba mengisi celah tersebut.

E. Kerangka Teoretis

Peneliti menggunakan konsep arena, habitus dan modal dari Pierre Bourdieu dan teori maskulinitas hegemonik dari Connell dan Messerschmidt untuk memahami struktur yang bekerja di dalam lingkungan FKUB. Kajian ini juga menggunakan konsep *intersubjectivity* dari Donna Haraway dan konsep strategi dan kontestasi dari Bourdieu serta empat pendekatan dari Orit Avishai untuk menganalisis agensi perempuan di FKUB.

⁶⁷ PUSAD, *Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data*, Laporan Riset, (Maret 2020).

Sebagai pengantar, peneliti perlu menyinggung pandangan Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulin. Bourdieu memandang bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan antara kelas dominan dan yang didominasi, sebagai konsekuensi dari sistem patriarki dan konstruksi gender yang ada di masyarakat. Menurutnya, dominasi maskulin yang ada dalam tatanan sosial berakar dari perbedaan biologis yang dikonstruksi secara sosial yang kemudian menciptakan pembagian kerja secara seksual,⁶⁸ yang akhirnya tampak seperti natural dan konvensional. Dengan demikian realitas sosial yang dihasilkan dominasi akan dengan sendirinya mengonfirmasikan representasi-representasi yang oleh dominasi itu memang diinginkan agar diberlakukan dan dijustifikasi.⁶⁹

Menurutnya, dominasi maskulin merupakan produk dari suatu kerja reproduksi tanpa henti yang dilakukan oleh berbagai agen dan tiga institusi utama, yakni keluarga, gereja dan sekolah.⁷⁰ Ketiganya dimainkan bersama secara objektif dan bekerja atas struktur-struktur tak sadar.⁷¹ Lewat dominasi maskulin itulah, tatanan maskulin kemudian terus-menerus direproduksi dari zaman ke zaman. Dengan demikian, dominasi maskulin merupakan persoalan struktur, yakni struktur dominasi yang maskulin, yang sangat penting dalam mengkaji habitus yang ada di lingkungan FKUB.

1. Arena dan Habitus dalam konteks FKUB

Konsep arena bagi Bourdieu menjadi sentral karena merupakan domain kehidupan sosial. Di dalam arenalah, agen berjuang memperoleh kuasa dan status. Perjuangan tersebut sangat terbantu oleh habitus, yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Melalui arena, agen juga dapat mengubah modal-modal yang dimilikinya.

Definisi arena menurut Bourdieu adalah:

“I define a field as a network, or a configuration, of objective relations between positions objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their

⁶⁸ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin, (La Domination Masculine)* penterjemah: Stephanus Aswar Herwinarko, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 43.

⁶⁹ *Ibid.*, 46.

⁷⁰ *Ibid.*, 49-50.

⁷¹ *Ibid.*, 120.

*occupants, agents or institutions, by their present and potential situation (situs) in the structure of the distribution of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objective relation to other positions (domination, subordination, homology, etc.).*⁷²

Definisi ini menunjukkan bahwa arena merupakan ruang bagi agen untuk berjejaring dengan menggunakan kaidah-kaidah dan struktur yang ditentukan oleh relasi-relasi yang otonom di antara posisi agen, kecuali dalam kasus arena ekonomi dan arena politik. Meskipun setiap arena bersifat mandiri, akan tetapi secara struktural mereka tetap homolog satu sama lain. Bagi Bourdieu, agen-agen tidak bertindak dalam ruang hampa, namun mereka berada pada situasi sosial yang nyata, yang diatur seperangkat relasi-relasi sosial yang objektif. Oleh karena itu, arena bukan ikatan intersubyektif antara individu, namun semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu.

Arena juga dimaknai sebagai ruang tempat agen saling bersaing untuk memperoleh sumber-sumber daya material atau kekuatan simbolis. Bourdieu menganalogikan arena seperti arena perjuangan, tempat pertarungan, sebuah medan dominasi dan tempat terjadinya konflik untuk mendapatkan posisi yang ditentukan oleh modal yang dimiliki agen. Dalam strukturnya, arena menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi tertentu untuk berupaya, baik individu maupun kolektif, mengamankan dan meningkatkan posisi mereka.⁷³ Artinya, setiap agen memiliki modal dan habitus yang berbeda-beda, tetapi saling berkontestasi satu sama lain di dalam arena.⁷⁴

Terdapat sejumlah arena semi otonom di dunia sosial, misalnya seni, agama, perguruan tinggi, dan lain-lain, yang semuanya memiliki

⁷² Loic J. D. Wacquant, "Towards a Reflexive Sociology: a Workshop with Pierre Bourdieu," *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989): 39.

⁷³ Wacquant, "Towards a Reflexive Sociology, 40.

⁷⁴ Nanang Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai," *Kanal*, Vol. 2, No. 2, (Maret 2014): 201

logika spesifik tersendiri dan semuanya membangun keyakinan di kalangan agen tentang hal-hal yang mereka pertaruhkan di suatu arena.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, komunitas dan organisasi keagamaan menjadi arena dengan logika dan keyakinan khusus.

Bourdieu memandang habitus berada dalam pikiran agen, sedangkan arena (*field*) berada di luar pikirannya. Maka, habitus mendasari arena atau habitus beroperasi dalam suatu arena. Mengutip Terry Rey, habitus dalam pandangan Bourdieu dimaknai sebagai 'matriks persepsi', atau 'dasar persepsi' dan apresiasi bagi semua pengalaman berikutnya.⁷⁶ Bagi Bourdieu, habitus mempredisposisikan agen untuk memahami dan berperilaku dengan cara tertentu.⁷⁷ Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Di satu sisi ia menstrukturkan struktur (*structuring structures*) kehidupan sosial, di sisi lain ia merupakan struktur yang distrukturkan (*structured structures*) oleh dunia sosial.⁷⁸ Proses ini disebut Bourdieu sebagai dialektika internalisasi atas eksternalitas dan eksternalisasi atas internalitas. Internalitas merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri agen, sedangkan eksternalitas adalah struktur objektif yang ada di luar perilaku sosial. Misalnya sebagai orang Jawa, seseorang dibentuk oleh orang Jawa itu sendiri, dan sebagai orang Jawa juga, seseorang membentuk budaya Jawa. Dengan demikian, habitus merupakan dasar epistemologis individu dan motor perilakunya.⁷⁹

Meski keberadaan agen dalam dunia sosial cukup bervariasi, namun agen-agen yang berada pada posisi yang sama dalam dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Oleh karena itu, habitus dapat menjadi fenomena kolektif.⁸⁰ Bourdieu menegaskan, "Habitus

⁷⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodernisme*, terjemah Nurhadi, Cet XIII, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2019), 583.

⁷⁶ Terry Rey, "Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion," *Religion*, Vol. 34 (2004): 335, and Terry Rey, *Bourdieu on Religion Imposing Faith and Legitimacy*, (New York: Routledge, 2014), 47-48.

⁷⁷ Rey, "Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion," 335.

⁷⁸ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi*, 581.

⁷⁹ Rey, *Bourdieu on Religion Imposing Faith and Legitimacy*, 48.

⁸⁰ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi*, 581

adalah produk sejarah, menghasilkan praktik individu dan kolektif.”⁸¹ Agen, menurut Bourdieu, bukanlah produk pasif dari struktur sosial (agen bisa memilih) dan juga tidak sepenuhnya bebas (pilihan agen ditentukan oleh habitus). “Orang tidaklah dungu, namun ia juga tidak sepenuhnya rasional. Orang bertindak secara beralasan,” demikian Bourdieu.⁸²

Penelitian ini memberi perhatian khusus pada habitus dalam konteks agama yang disebut dengan “*religious habitus*” dari Terry Rey yang didefinisikan sebagai:

*“The religious habitus is the specifically religious dimension of an individual agent’s habitus that manifests itself most apparently, though not exclusively, in the religious field. It is the principal determining subjective influence on particular religious interests and needs, on perceptions and uses of religious symbols and rituals, on what forms of religious capital are deemed worthy of pursuit, and generally on how individuals fare in the religious field.”*⁸³

Definisi ini memberi gambaran jelas tentang salah satu dimensi religius dari habitus agen yang paling banyak diejawantahkan dalam arena keagamaan. Seperti dikutip Terry Rey, Bourdieu sendiri mendefinisikan habitus religius sebagai “pembangkit utama dari semua pikiran, persepsi, dan tindakan yang konsisten dengan norma representasi religius dari alam dan dunia supranatural.”⁸⁴ Oleh karena itu, habitus keagamaan agen dan relasi kuasa, baik individu maupun institusi, sangat menentukan persepsi dan apresiasi terhadap makna dan fungsi simbol dan doktrin agama.

Habitus dapat diperkuat dengan *doxa*. Menurut Bourdieu, *doxa* adalah sudut pandang tertentu yang biasanya dominan ada dalam masyarakat tertentu, dan secara dipaksakan diyakini sebagai sudut

⁸¹ Pierre Bourdieu, *Outline of Theory, Outline of A Theory of Practice*. (R. Nice, Trans.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 82.

⁸² Pierre Bourdieu, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*, Matthew Adamson, Trans., (Stanford: Stanford University Press, 1990), 7.

⁸³ Rey, “Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion,” 337

⁸⁴ *Ibid.*

pandang universal (*self-evident*).⁸⁵ Dengan kata lain, *doxa* merupakan hal-hal yang diterima orang tanpa dia sendiri mengetahuinya. Misalnya ketika orang-orang di lapisan bawah ditanya tentang faktor utama keberhasilan di sekolah, mereka akan menjawab bakat alami sehingga pada akhirnya mereka mempercayai bahwa mereka bodoh.⁸⁶ Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Oleh karena itu, meskipun *doxa* bukan sesuatu yang alami dan dapat diubah karena ia hadir dari apa yang disebut Lovell sebagai “kesewenang-wenangan budaya,”⁸⁷ maka ia sulit untuk diubah. Di titik inilah kekerasan simbolik dalam arena dapat terjadi dan juga sudut pandang dominan yang diuniversalikan, sehingga berkontribusi terhadap reproduksi ketidaksetaraan sosial.

Terkait dengan konsep arena dan modal, yang akan dijelaskan dalam bagian berikut, agen yang akan memasuki arena tertentu harus memiliki habitus agar ia mampu bertahan atau memainkan agensinya dalam pertarungan kekuatan di dalamnya. Agen berinteraksi dalam arena sosial melalui habitus mereka,⁸⁸ dan menurut Bourdieu agen harus mendayagunakan seluruh modal yang dimilikinya agar bisa memperoleh manfaat yang paling besar dari upayanya berpartisipasi dalam arena.⁸⁹

Kerangka konseptual Bourdieu ini relevan untuk menggambarkan arena seperti apa yang mengitari anggota FKUB dan untuk menjelaskan habitus seperti apa yang mengonstruksi mereka. Konsep arena juga digunakan untuk menggali strategi-strategi yang mereka mainkan ketika berada di dalam struktur FKUB yang

⁸⁵ Pierre Bourdieu, “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field,” translated by Loi‘c J.D. Wacquant and Samar Farage, *Sociological Theory*, Vol. 12, No. 1. (March, 1994): 15.

⁸⁶ In Conversation Pierre Bourdieu and Terry Eagleton, “Doxa and Common Life,” *New Left Review*, London Vol. 0, Iss. 191191, (Jan 1, 1992): 111

⁸⁷ Terry Lovell, “Thinking feminism with and against Bourdieu,” *Feminist Theory*, Vol. 1(1), (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2000), 15.

⁸⁸ Rey, *Bourdieu on Religion Imposing Faith and Legitimacy*, 48.

⁸⁹ Bourdieu, *Outline of Theory*, 179-183.

maskulin, dalam rangka mempertahankan atau memperoleh posisi atau kuasa.

2. Telaah Modal

Istilah modal (*capital*) digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Modal diperoleh jika agen memiliki habitus yang tepat dan modal digunakan sebagai penentu posisi agen dalam suatu arena. Dengan demikian, modal memiliki peran penting dalam hubungannya dengan kekuatan sosial. Legitimasi agen dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya.

Menurut Bourdieu, modal, yang membutuhkan waktu untuk terakumulasi,⁹⁰ berwujud dalam tiga bentuk, yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial.⁹¹ Modal ekonomi merupakan modal yang segera dan secara langsung dapat dikonversi menjadi uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak milik.⁹² Bentuknya berupa alat-alat produksi, materi dan uang. Modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bourdieu menyebut modal ekonomi sebagai akar dari semua jenis modal lainnya.⁹³

Modal sosial, dimaknai Bourdieu sebagai “kewajiban sosial berupa ‘koneksi,’ yang dalam kondisi tertentu dapat diubah menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kebangsawanan.”⁹⁴ Haryatmoko menegaskan bahwa modal sosial termasuk segala ikatan sosial yang dapat digerakkan untuk kemajuan agen, misalnya keluarga, komunitas agama, jaringan kerja, jaringan bisnis, dan lain-lain. Modal sosial dimiliki agen (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki

⁹⁰ Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” Richardson, J., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Westport, (CT: Greenwood, 1986), 15.

⁹¹ Bourdieu, “The Forms of Capital,” 16.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, 21.

⁹⁴ *Ibid.*, 16.

kuasa.⁹⁵ Maka, modal sosial mengandung unsur kepercayaan, solidaritas, dan loyalitas, sehingga dapat menjamin penerimaan eksistensi agen dalam ruang-ruang sosial yang terikat seperti keluarga, kelas sosial, partai, sekolah, dan ruang-ruang sosial lainnya. Kepemilikan modal sosial dipengaruhi oleh jumlah jaringan relasi-relasi, sehingga modal sosial perlu diusahakan melalui berbagai strategi secara individual atau kolektif.⁹⁶

Sedangkan modal kultural, dapat dikonversi (dalam kondisi tertentu) menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan.⁹⁷ Modal kultural menurut Bourdieu eksis dalam tiga bentuk.⁹⁸ Pertama, bersifat mewujud dalam diri, berupa sistem disposisi yang tahan lama dalam tubuh dan pikiran, seperti jujur dan suka menolong, yang melekat dalam diri agen sampai menjadi habitus. Oleh karena itu, ia tidak mudah dipindah atau ditukar. Kedua, bersifat objektif, berupa materi yang secara budaya dianggap baik, seperti buku, lukisan, monumen dan mesin, yang dapat ditukar menjadi modal ekonomi. Ketiga, bersifat institusional, berupa hal-hal yang diobjektifikasi dalam bentuk aturan-aturan tertentu yang diasumsikan memberi jaminan mutu secara sosial, seperti gelar pendidikan atau jabatan politik. Melalui pertukaran dengan modal ekonomi, modal kultural yang bersifat institusional berpotensi mendapatkan keuntungan baik secara material maupun simbolik.

Selain tiga bentuk modal di atas, Bourdieu juga menyebut modal-modal lainnya, termasuk modal simbolik, “yang merupakan bentuk yang diambil oleh berbagai jenis modal ketika dianggap dan diakui sebagai suatu yang sah.”⁹⁹ Modal simbolik dimaknainya sebagai

⁹⁵ Haryatmoko, “Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepsanuan Budaya Penguasa,” *Basis* No. 11 – 12, Tahun Ke-52, (November – Desember 2003): 3.

⁹⁶ Bourdieu, “The Forms of Capital,” 52

⁹⁷ *Ibid.*, 16.

⁹⁸ *Ibid.*, 17.

⁹⁹ Pierre Bourdieu, “Social Space and Symbolic Power,” *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1. (Spring, 1989): 17. Menurut Suzanne Labesge, Bourdieu membagi modal ke dalam empat bentuk, yakni ekonomi, sosial, budaya dan simbolik, tetapi modal sosial dan modal kultural merupakan dua modal utama yang aktif atau konstruktif dalam ruang sosial. Lihat Suzanne Labesge, “Toward

modal, dalam bentuk apa pun, yang dipahami secara simbolis dalam hubungannya dengan pengakuan kognitif yang dibentuk secara sosial.¹⁰⁰ Maka, ia mengartikan modal simbolik sebagai setiap properti dari tiga bentuk modal di atas, yang dirasakan atau dikenali oleh agen sebagai memberinya nilai,¹⁰¹ sehingga ia berkaitan erat dengan status, gaya hidup, kehormatan, dan kedudukan (prestise).¹⁰²

Bagi Bourdieu, modal simbolik dapat dimiliki oleh agen tunggal atau kolektif, terutama korps, keluarga, kelompok status, badan yang dibentuk dan negara.¹⁰³ Contoh nyata dari modal simbolik dapat berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun dapat juga ciri-ciri yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, dan cara mengafirmasi otoritasnya.¹⁰⁴ Modal simbolik berperan dalam memaparkan relasi-relasi kuasa dalam sistem dan struktur yang ada di masyarakat.

Modal dapat dipertukarkan dan diakumulasi antara modal yang satu dengan modal yang lainnya. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam arena. Modal akan eksis dan berfungsi

an Integration of Gender into Bourdieu's Concept of Cultural Capital," *Sociology of Sport Journal*, (June, 1995): 134. Sementara itu Kate Huppatz memandang bahwa memang terdapat tiga bentuk asli modal menurut Bourdieu (ekonomi, budaya dan sosial), tetapi ia kemudian menambahkan modal simbolik. Bahkan dalam tafsiran Huppatz, penambahan bentuk modal lainnya (selain modal simbolik) sangat diperlukan untuk menjelaskan struktur dan dinamika masyarakat yang berbeda-beda. Lihat Kate Huppatz, "Reworking Bourdieu's 'Capital': Feminine and Female Capitals in the Field of Paid Caring Work" *Sociology*, Volume 43/1, (2009): 46.

¹⁰⁰ Bourdieu, "The Forms of Capital," 27.

¹⁰¹ Pierre Bourdieu, *Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field* Translation by: Loïc J.D. Wacquant and Samar Farage, *Sociological Theory*, Vol. 12, No. 1. (March, 1994): 8-9.

¹⁰² Holly Thorpe, "Bourdieu, Feminism and Female Physical Culture: Gender Reflexivity and the Habitus-Field Complex," *Sociology of Sport Journal*, Vol. 26 (2009): 493.

¹⁰³ Pierre Bourdieu, "Scattered Remarks," Translated by Tarik Wareh and Loïc Wacquant, *European Journal of Social Theory*, 2 (3), (Sage Publications: London, Thousand Oaks, CA and New Delhi 1999), 337.

¹⁰⁴ Haryatmoko, "Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu, 3

dalam arena, karena modal mempunyai kekuatan terhadap arena. Namun demikian, modal-modal tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan signifikan di dalam suatu arena, karena setiap arena memiliki kebutuhan modal yang spesifik. Dalam arena kontestasi atau pertarungan sosial, modal dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan atau mengubah struktur lingkungan atau sosialnya.

Dalam konteks ini, penting untuk menggali berbagai modal yang dimiliki oleh masing-masing perempuan anggota FKUB dan bagaimana mereka mendayagunakan modal-modal tersebut di dalam arena yang mengitarinya dengan habitus yang mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, agensi masing-masing perempuan anggota FKUB dipengaruhi oleh habitus, arena dan modal yang berbeda-beda.

3. Maskulinitas Hegemonik

Untuk menelaah fenomena kesenjangan yang sangat lebar antara laki-laki dan perempuan dalam FKUB, peneliti juga menggunakan teori maskulinitas hegemonik sebagai kerangka pemikiran.

Sosiolog terkemuka dalam kajian maskulintas R.W. Connell mendefinisikan “maskulinitas” sebagai “pola konfigurasi praktik-praktik sosial yang dikaitkan dengan posisi laki-laki dalam tatanan gender, dan secara sosial dibedakan dari praktik-praktik yang terkait dengan posisi perempuan”.¹⁰⁵ Definisi lebih detail diungkapkan Flourish Itulua-Abumere:

“maskulinitas terdiri dari perilaku, bahasa dan praktik, yang ada di area budaya dan organisasi tertentu, yang umumnya dikaitkan dengan laki-laki dan dengan demikian secara budaya didefinisikan sebagai bukan feminin.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Raewyn Connell, “Gender, Men, and Masculinities”, *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*, t.t., 2.

¹⁰⁶ Flourish Itulua-Abumere, “Understanding Men and Masculinity in Modern Society”, *Open Journal of Social Science Research (OJSSR)*, No. 1, (2013), 42.

Di sini maskulinitas disandingkan dengan femininitas karena memang pada dasarnya maskulinitas tidak mungkin dipikirkan tanpa femininitas.¹⁰⁷ Maskulinitas dan feminitas sendiri tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu, karena keduanya ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, berdasarkan riset Rose dkk, dapatlah dikatakan bahwa *that man/maleness describes masculinity and woman/femaleness describes femininity*.¹⁰⁸

Connell memandang maskulinitas (dan juga femininitas) dapat dipahami jika sistem gender juga dipahami.¹⁰⁹ Terdapat dua teori paling populer tentang gender. Pertama “teori peran seks”¹¹⁰ dan kedua “teori kategoris.”¹¹¹ Menurutnya, dua teori ini memiliki kelemahan. Teori pertama menafikan isu kekuasaan dan kekerasan, sedangkan teori kedua menafikan kompleksitas gender, seperti kekerasan berbasis gender dan tidak memberi perhatian cukup pada interaksi antara gender dengan kelas dan ras. Untuk itu, Connell mengusulkan perlu pendekatan ketiga yang fokus pada relasi gender, yang menekankan bahwa masalah gender selalu menyangkut struktur relasi sosial. Baginya, “pendekatan ini adalah satu-satunya dasar ilmiah yang memadai untuk memahami laki-laki dan maskulinitas”¹¹².

Relasi gender dalam praktiknya tidak hanya terjadi di level individual, tetapi juga di level institusi (agama, sekolah, negara, dan

¹⁰⁷ Cynthia Cockburn, “Maskulinitas, Kiri dan Feminisme”, dalam Chapman, Rowena and Rutherford, Jonathan, *Male Order*, (London: Lawrence & Wishart Ltd, 1988), 339. Lihat juga Michael Kimmel, “Masculinity as Homophobia: Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity,” *Theorizing Masculinities*, editor: Harry Brod dan Michael Kaufman, (Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994), 125.

¹⁰⁸ Rose Marie, Hoffman Johna Hattie and L. Dianne Borders, “Personal Definitions of Masculinity and Femininity as an Aspect of Gender Self-Concept,” *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, Volume 44, Issue 1, (Spring 2005): 76.

¹⁰⁹ Connell, “Gender, Men, and Masculinities,” 2.

¹¹⁰ Teori yang menjelaskan pola gender dengan mengacu pada kebiasaan sosial yang kemudian mendefinisikan perilaku yang pantas untuk perempuan dan laki-laki.

¹¹¹ Teori yang menjelaskan perilaku sosial berdasarkan perbedaan biologis jenis kelamin.

¹¹² “Gender, Men, and Masculinities,” 2.

lain-lain) yang disebut “rezim gender”. Rezim gender dan pola gender dalam budaya disebut “tatanan gender” yang ada di suatu masyarakat, yang semuanya adalah produk historis dan dapat berubah.¹¹³ Tatanan gender bukanlah entitas yang statis, tetapi merupakan bentuk interaksi terus menerus dengan struktur dunia di sekitarnya.¹¹⁴ Sama seperti gender, maskulinitas (dan femininitas) juga dikonstruksi secara sosial. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa maskulinitas tidak hanya berbeda, tetapi juga dapat berubah,¹¹⁵ karena ia dibangun secara sosial, budaya, historis dan politis.¹¹⁶

Connell kemudian menghadirkan gagasan tentang “maskulinitas hegemonik.” Hegemonik dalam hal ini menandakan posisi otoritas dan kepemimpinan laki-laki dalam tatanan gender secara keseluruhan.¹¹⁷ Maskulinitas hegemonik didefinisikan Connell dan Messerschmidt sebagai “pola praktik (hal-hal yang dilakukan, bukan hanya seperangkat harapan, peran atau identitas) yang memungkinkan dominasi laki-laki terhadap perempuan terus berlanjut,” dan hegemoni dicapai melalui budaya, institusi, dan persuasi.¹¹⁸ Maka maskulinias hegemonik juga bersifat historis dan

¹¹³ *Ibid.*, 5.

¹¹⁴ Michael Kaufman, “Men, Feminism, and Men’s Contradictory Experiences of Power”, *Theorizing Masculinities*, editor: Harry Brod dan Michael Kaufman, (Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994), 147.

¹¹⁵ R. W. Connell dan James W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, *Gender & Society*, Vol. 19 No. 6, (December 2005): 835.

¹¹⁶ Flourish Itulua-Abumere, “Understanding Men and Masculinity in Modern Society,” 45. Lihat juga Jeff Hearn dan David L. Collinson, “Theorizing Unities and Differences between Men and Between Masculinities,” *Theorizing Masculinities*, ed. Harry Brod dan Michael Kaufman, (Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994), 108.

¹¹⁷ R.W. Connell, *Understanding Men: Gender Sociology and the New International*, 4. Lihat juga R. W. Connell, *Gender and Power*, (California: Stanford University Press, 1987), 183. Konsep ini pertama kali dimunculkan dalam laporan studi lapangannya tentang ketidaksetaraan sosial di sekolah menengah Australia dan dalam perdebatan tentang peran laki-laki dalam politik perburuhan Australia.

¹¹⁸ Connell dan Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking,” 832.

spesifik serta dapat berubah. Hegemoni dimungkinkan terjadi ketika perempuan diposisikan sebagai kelompok subordinat.¹¹⁹ Maskulinitas hegemonik oleh karenanya sangat erat kaitannya dengan subordinasi perempuan.

Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang pendidikan digunakan untuk memahami dinamika kehidupan di ruang kelas, termasuk pola-pola perlawanan dan intimidasi di antara anak laki-laki. Konsep ini digunakan dalam mempelajari representasi media laki-laki, misalnya, interaksi antara olah raga dan citra perang.¹²⁰ Konsep ini juga terbukti signifikan dalam studi organisasi, bagaimana maskulinitas hegemonik dalam organisasi tertentu eksis dan berperan dalam pengambilan keputusan. Di titik inilah, konsep ini digunakan untuk menganalisis maskulinitas hegemonik hadir dan berperan dalam FKUB serta dampaknya terhadap perwujudan kerukunan dan perdamaian.

Connell dan Messerschmidt berpandangan bahwa maskulinitas hegemonik secara empiris dapat dianalisis pada tiga tingkatan:¹²¹ *Pertama*, di level lokal, yang dibangun di arena tatap muka langsung dalam keluarga, organisasi, dan komunitas terdekat; *Kedua*, di level regional, yang dibangun pada tingkat budaya atau negara-bangsa; dan *ketiga*, di level global yang dibangun di arena transnasional. Ketiga level tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi. Meskipun model maskulinitas hegemonik lokal mungkin berbeda satu sama lain, mereka umumnya tumpang tindih, sehingga adanya pluralitas maskulinitas hegemonik di tingkat lokal bisa sekaligus menggambarkan adanya singularitas maskulinitas hegemonik di tingkat regional atau bahkan global.¹²²

Agama dalam hal ini berkontribusi membangun rangkaian hubungan kekuasaan yang kompleks dan saling terkait dalam tatanan gender, misalnya superioritas laki-laki terhadap perempuan termasuk

¹¹⁹ *Ibid.*, 844.

¹²⁰ *Ibid.*, 833.

¹²¹ *Ibid.*, 849.

¹²² *Ibid.*, 850.

bagian dari ajaran agama-agama monoteis.¹²³ Oleh karena itu ungkapan Linda Woodhead¹²⁴ sangat tepat bahwa dalam meneliti persimpangan antara gender dan agama, perhatian besar perlu diberikan pada relasi kuasa, karena keduanya sama-sama punya kontribusi dalam menciptakan dan melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Menurut Woodhead, salah satu aspek yang unik dalam agama dan berperan sebagai sumber kekuatan adalah “*sacred power*” yang berasal dari makhluk supernatural dan secara eksklusif digunakan oleh representasi resmi agama (pemimpin agama).¹²⁵ *Sacred power* menyebabkan lahirnya dominasi maskulin, yang tergambar dari perwakilan resmi agama (tokoh atau pimpinan agama) dalam berbagai organisasi masih didominasi oleh laki-laki. Mereka (ulama, pendeta, pastor, dan lain-lain) menduduki peringkat tinggi dalam posisi hierarki keagamaan sebagai pemegang wacana agama dan sumber kekuatan moral.¹²⁶

Kerangka konseptual ini digunakan untuk menemukan bentuk-bentuk dan struktur-struktur yang berkontribusi terhadap maskulinitas hegemonik di FKUB. Dua hal ini menjadi penting dipahami, karena untuk meningkatkan posisi dan peran perempuan dalam konteks dialog antaragama untuk perdamaian di Indonesia, tidak akan cukup tanpa ada upaya untuk mengatasi wacana dan praktik maskulinitas hegemonik yang mendasarinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹²³ Rachmad Hidayat, “Santri, Kyai and Ulama Framing Masculinity within Indonesian Religious Elites”, tulisan dipresentasikan pada *International Workshop on Masculinities in Asia*, 4-5 August 2011, 2. Lihat juga Judith K. Gardiner, “Men, Masculinities and Feminist Theory”, dalam *Handbook of Studies on Men and Masculinities*, ed. Michael S. Kimmel, Jeff Hearn and R.W. Connell, (Sage Publication Inc., Mei 2012), 36.

¹²⁴ Linda Woodhead, “Gender Differences in Religious Practice and Significance,” in *International Scientific Researchers*, 13, (2013): 61.

¹²⁵ Hidayat, “Santri, Kyai and Ulama Framing Masculinity,” 2.

¹²⁶ *Ibid.*, 7-8.

4. Agensi Perempuan dalam FKUB

Untuk tujuan penelitian ini adalah penting untuk memperjelas terlebih dahulu pemaknaan terhadap agen itu sendiri. “Subjek” menjadi kata kunci dalam diskusi tentang keagenan. Donna Haraway telah melakukan perubahan cara pandang yang sangat signifikan tentang konsep subjek ini. Para sosiolog dan feminis gelombang kedua yang memiliki cara pandang subjek-objek dalam berrelasi, diubah oleh Haraway menjadi relasi subjek-subjek. Pandangan Haraway ini tersurat dan tersirat dalam karya monumentalnya *A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century*. Menurut Haraway, perempuan bukan hanya terasing dari produknya tetapi dalam arti yang mendalam tidak eksis sebagai subjek, bahkan subjek potensial sekalipun.¹²⁷

Dia mengritik cara pandang sebagian besar feminis Amerika yang dikotomis antara pikiran dan tubuh, hewan dan manusia, organisme dan mesin, publik dan pribadi, laki-laki dan perempuan, dan lain-lain,¹²⁸ dengan frame subjek-objek sebagai salah arah. Haraway kemudian mengusulkan cara pandang baru dengan metafora *cyborg*,¹²⁹ sebuah organisme cyber dengan identitas yang cair. Cyborg memandang pihak lain yang pada awalnya ditempatkan sebagai objek, diposisikan sebagai subjek. Maka, dalam pandangan Haraway semua spesies adalah subjek, dengan posisi yang setara. Spesies yang dimaksud tidak hanya antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga antara manusia dan hewan.

Hubungan antara dua subjek tersebut membentuk *intersubjectivity* yang saling memengaruhi satu sama

¹²⁷ Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century,” dalam *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature* (New York; Routledge, 1991), 159.

¹²⁸ *Ibid.*, 163.

¹²⁹ *Ibid.*, 180. Lihat juga Donna Haraway, “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s” dalam *Feminism/Postmodernism*, Ed. Linda J. Nicholson, (New York: Routledge, 1990), 35-36.

lain.¹³⁰ Hal-hal yang dilakukan oleh satu spesies misalnya, akan berpengaruh terhadap spesies lainnya. Dalam konteks penelitian ini, apa yang dilakukan oleh laki-laki akan berpengaruh terhadap perempuan, dan sebaliknya apa yang dilakukan oleh perempuan akan berpengaruh terhadap laki-laki. Maka sebagai subjek yang setara, seharusnya laki-laki dan perempuan diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi, marginalisasi atau dominasi salah satu terhadap yang lainnya. Mengacu pada pendapat Haraway di atas, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi agen penting dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian di masyarakat. Konsep ini menjadi salah satu kerangka penting dalam menganalisis agensi perempuan di FKUB.

Sementara itu dalam diskursus agensi-struktur, terdapat beberapa teori yang berusaha melakukan sintesa keduanya dalam upaya menganalisis gejala dan perubahan sosial. Salah satunya adalah Anthony Giddens yang berpendapat bahwa agensi¹³¹ dan struktur¹³² memiliki hubungan yang dialektis, saling memengaruhi. Agen berkontribusi terhadap lahir atau berubahnya struktur. Agen dengan demikian memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengubah struktur di masyarakat, termasuk norma, regulasi dan kebijakan. Di sisi lain, agen juga dibatasi oleh struktur sosial. Namun demikian, struktur dalam pandangan Giddens bersifat mengekang (*constraining*) sekaligus memberdayakan (*enabling*), karena struktur dilihat sebagai

¹³⁰ Theresa Senft, "Reading Notes on Donna Haraway's 'Cyborg Manifesto,'" http://www.terrisenft.net/wpcontent/uploads/2017/02/Senft_Notes_Haraway_Cyborg.pdf, diakses pada 12 Januari 2024.

¹³¹ Agensi sendiri dimaknai Giddens bukan sebagai serangkaian tindakan terpisah yang kemudian digabungkan bersama, tetapi *a continuous flow of conduct* (aliran prilaku yang terus menerus). Sementara 'tindakan' dimaknai Giddens sebagai "arus intervensi kausal aktual atau hal yang direfleksikan dari makhluk jasmani dalam proses peristiwa-peristiwa di dunia yang sedang berlangsung." Lihat Anthony Giddens, *Central Problems in Social Theory* (*Central Problems in Social Theory*, (London: Macmillan Education Ltd, 1979), 55

¹³² Struktur diartikan Giddens sebagai sebagai "tatanan virtual dari perbedaan yang diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sosial, baik sebagai media maupun hasilnya." Giddens, *Central Problems in Social Theory* Central ..., 3.

outcome sekaligus *medium* dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan secara berulang dalam praktik sosial.¹³³

Senada dengan Giddens, Pierre Bourdieu juga memberi perhatian pada pengalaman agen subjektif maupun struktur objektif. Menurutnya, agen di dalam struktur adalah subjek yang terus berproses bersama struktur. Berbeda dengan Giddens, Bourdieu membangun teorinya melalui tiga konsep utama, yakni habitus, arena (*field*) dan modal (*capital*). Agen dalam habitus tertentu, dapat melakukan berbagai cara untuk bermain di dalam arena dengan menggunakan modal-modalnya. Terkait dengan tema penelitian ini, ketiga teori di atas dijadikan kerangka analisis, dengan penekanan terutama pada teori dari Pierre Bourdieu.

Dalam arena, para agen akan menerapkan berbagai strategi. Namun strategi tersebut tidak dilakukan secara sengaja atau direncanakan sebelumnya.¹³⁴ Melalui strategi inilah, agen, baik individual maupun kolektif, dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi mereka. Dalam hal ini, strategi agen tergantung pada posisi mereka di dalam arena.¹³⁵ Dapat dikatakan bahwa strategi merupakan aspek penting dalam pandangan Bourdieu.

Selain strategi, aspek distingsi juga menjadi penting untuk dilihat terkait dengan agen ketika berada di dalam arena tertentu. *Distinction* menurut Bourdieu adalah

*“a certain quality of bearing and manners, mostly considered innate (one speaks of distinction naturelle, “natural refinement”), is nothing in fact but difference, a gap, a distinctive feature, in short, a relational property existing only in and through its relation with other properties.”*¹³⁶

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa distingsi merupakan kualitas perilaku tertentu, yang dianggap bawaan, yang menunjukkan

¹³³ Giddens, *Central Problems in Social Theory*, 69-70.

¹³⁴ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi*, 58.

¹³⁵ Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology, 101.

¹³⁶ Pierre Bourdieu, “First Lecture, Social Space and Symbolic Space: Introduction to a Japanese Reading of Distinction,” *Poetics Today*, Vol. 12, No. 4, National Literatures/Social Spaces, (Winter, 1991): 631.

perbedaan, gap, dan ciri khas dalam hubungannya dengan suatu posisi sosial. Menurutnya, distingsi merupakan upaya individu atau kelompok dalam ruang sosial tertentu untuk menampakkan perbedaan atau ciri khas mereka dengan yang lain, yang mereka buat sendiri, untuk memperlihatkan kelasnya dalam masyarakat.¹³⁷ Maka distingsi menjadi perjuangan bagi individu atau kelompok dalam membangun keunggulan mereka dengan yang lain.

Dalam konteks perempuan di FKUB, strategi dan distingsi mereka dalam arena FKUB yang sangat maskulin menjadi penting digali dan ditunjukkan untuk mempertegas agensi mereka. Dan pada dasarnya, kalau merujuk pendapat Bourdieu, sebagai kelompok yang istimewa di dalam FKUB, distingsi mereka akan muncul melalui mekanisme objektif.¹³⁸ Aspek distingsi juga penting ditemukan untuk menjelaskan perbedaan mereka dengan laki-laki ketika berada di dalam FKUB dan pengaruhnya terhadap dinamika organisasi tersebut.

Terkait dengan agensi perempuan di dalam FKUB, peneliti juga menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Orit Avishai. Avishai¹³⁹ yang membedakan empat pendekatan dalam melihat agensi perempuan, yakni *resistance*, *empowerment*, *instrumental*, dan *compliance*. Kerangka ini kemudian dikembangkan dan dilengkapi oleh Kelsy C. Burke.¹⁴⁰ Menurut Burke, pendekatan *resistance* (perlawanan) paling mudah terlihat ketika individu menolak *status quo*. Mengutip Saba Mahmood, Burke menilai bahwa pendekatan ini mengecualikan perempuan yang mematuhi agama gender-tradisional untuk menjadi aktor. Sama seperti pendekatan *resistance*, pendekatan *empowerment* (pemberdayaan) berasumsi bahwa elemen dasar agama gender-tradisional berbahaya bagi perempuan. Namun demikian, model pemberdayaan tidak

¹³⁷ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 6.

¹³⁸ Bourdieu, “First Lecture, Social Space and Symbolic Space,” 249.

¹³⁹ Orit Avishai, “Doing Religion” In a Secular World Women in Conservative Religions and the Question of Agency,” *Gender & Society*, Vol. 22 No. 4, (August 2008): 409-433.

¹⁴⁰ Kelsy C. Burke, “Women’s Agency in Gender-Traditional Religions: A Review of Four Approaches,” *Sociology Compass*, 6/2 (2012), 122–133.

mengharuskan perempuan untuk menentang melainkan perempuan mengubah respons mereka terhadap keyakinan atau praktik tertentu. Meski pendekatan pemberdayaan ini penting karena meniscayakan adanya partisipasi aktif perempuan, akan tetapi menurut Burke penting juga untuk melihat ketika perempuan dalam kondisi pasif.

Sementara pendekatan *instrumental* berasumsi bahwa perempuan ingin membebaskan diri dari budaya patriarki yang mencekik kehidupan mereka. "Pendekatan ini fokus pada cara-cara perempuan menggunakan partisipasi mereka dalam agama gender-tradisional untuk keuntungan dalam aspek non-keagamaan dalam kehidupan mereka," demikian Burke.¹⁴¹ Terakhir adalah pendekatan *compliant* yang memandang bahwa perempuan menunjukkan agensinya dengan cara menyesuaikan diri atau patuh terhadap agamanya. Dalam bahasa Avishai, perempuan menunjukkan hak pilihnya ketika mereka "patuh terhadap agamanya", terlepas dari motivasi atau hasil dari perbuatan tersebut.¹⁴² Catatan menarik dari Burke bahwa pendekatan pertama, kedua dan ketiga bergantung pada gagasan otonomi, yaitu individu bertindak untuk dirinya sendiri. Namun pendekatan keempat berusaha untuk bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang ilahi.¹⁴³

5. Dialog antaragama untuk perdamaian

Dialog antaragama, atau dialog antariman, dimaknai secara beragam. Misalnya, dialog diartikan sebagai komunikasi dua arah antar orang-orang yang sungguh-sungguh berbeda pandangan terhadap satu subjek dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik kebenaran subjek tersebut dari orang lain.¹⁴⁴ Dialog dilukiskan sebagai pertukaran timbal balik dari pandangan-pandangan antara orang-orang

¹⁴¹ *Ibid.*, 129 - 131.

¹⁴² Avishai, "Doing Religion" In a Secular World Women in Conservative," 413.

¹⁴³ Burke, Women's Agency in Gender-Traditional Religions," 132.

¹⁴⁴ W. Montgomery Watt, *Islam and Christianity Today: A Contribution to Dialogue*, terj. Eno Syafrudien (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), 7.

yang telah memiliki satu kepedulian murni terhadap satu sama lain dan mereka yang terbuka untuk belajar satu sama lainnya.¹⁴⁵

Dialog antaragama diartikan sebagai bahasa kasih Tuhan yang diekspresikan dalam hidup. Dialog merupakan pertemuan hati dan pikiran antarpemeluk agama yang berbeda sehingga membawa para peserta dialog lebih dekat kepada misteri Tuhan.¹⁴⁶ Lebih jauh Th. Sumartana menyatakan bahwa dalam arti politik, dialog berarti proses demokrasi.¹⁴⁷ Intinya dialog antaragama adalah dialog yang melibatkan orang-orang dari berbagai tradisi agama dengan berproses dan belajar bersama untuk saling memahami satu sama lain secara tulus dan terbuka sehingga dapat bekerja sama untuk menciptakan perdamaian.

Dialog antaragama sangat signifikan dalam konteks pembangunan perdamaian. Merujuk pendapat Abu-Nimer, komponen inti dari pembangunan perdamaian antaragama adalah dialog intraagama dan dialog antaragama.¹⁴⁸ Dialog antaragama dalam pembangunan perdamaian menjadi signifikan karena ia dapat menjadi nilai yang besar dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Dialog antaragama (dan intraagama) juga biasanya dilakukan untuk merespon masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat.

Menurut Abu-Nimer, kaitan antara dialog dan aksi bersama ini sesuai dengan konsep seperti 3H yakni pendekatan kepala (*head*), tangan (*hand*) dan hati (*heart*).¹⁴⁹ Konsep 3H ini pertama kali digagas oleh Leonard Swidler, pendiri *Dialogue Institute* dari *Temple*

¹⁴⁵ Leonard Swidler, "A. Dialogue on Dialogue", dalam Leonard Swidler, dkk., *Death or Dialogue? From the Age of Monologue to the Age of Dialogue* (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), 57.

¹⁴⁶ Sebastian d'Ambar, *Life in Dialogue: Pathways to Inter-religious Dialogue and the Vision-Experience of the Islamic-Christian Silsilah Dialogue Movement* (Philipina: Silsilah Publications, 1991), 43.

¹⁴⁷ Th. Sumartana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi Tentang Hubungan Antaragama di Indonesia", dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 87.

¹⁴⁸ Mohammed Abu-Nimer, *Evaluating Interreligious Peacebuilding and Dialogue Methods and Frameworks*, edited by Mohammed Abu-Nimer and Renáta Katalin Nelson, (Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021), 1.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 8.

University, Amerika Serikat. Swidler membagi dialog antaragama ke dalam tiga jenis. Pertama dialog ide atau kata-kata (*head*), kedua dialog aksi kolaborasi (*hand*), dan ketiga dialog spiritual (*heart*).¹⁵⁰ Mengingat agama bersifat integratif dan komprehensif, maka ketiga jenis dialog tersebut, menurut Swidler, perlu dilakukan secara bersamaan agar lengkap sehingga berdampak signifikan bagi perdamaian dunia.

Dalam penelitian ini, dialog antaragama untuk perdamaian menjadi perspektif penting untuk menelaah wacana dan praktik dialog antaragama di dalam konteks FKUB di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengkombinasikan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian partisipatif yang menekankan pentingnya subjektivitas manusia dan kesadaran dalam menciptakan pengetahuan, dan menempatkan manusia secara emansipatif, personal dan transformasi sosial sebagai tujuan utama dari riset ilmu sosial.¹⁵¹

Perlu peneliti tegaskan bahwa peneliti sendiri merupakan salah satu anggota FKUB Provinsi DIY sejak tahun 2014 sampai saat ini. Oleh karena itu, metode ini di satu sisi memudahkan peneliti untuk menggali dan menyelami pengetahuan dan pengalaman para perempuan anggota FKUB. Di sisi lain, peneliti menyadari sepenuhnya mengenai kemungkinan adanya bias sebagai *insider*. Namun demikian, peneliti sudah memiliki pengalaman dalam isu dialog antaragama dan isu perempuan jauh sebelum menjadi anggota FKUB Provinsi DIY. Peneliti sudah terlibat aktif dalam wacana dan

¹⁵⁰ Leonard Swidler, *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*, (New York: Palgrave MacMillan, 2014), 47-51. Lihat juga <https://dialogueinstitute.org/what-is-dialogue>, diakses pada 19 Mei 2023.

¹⁵¹ Patricia Maguire, *Doing Participatory Research: A Feminist Approach*, (Massachusetts: The Centre for International Education, 1987), 5-7 dan 29

lembaga dialog antaragama dan isu perempuan sejak akhir tahun 1997 sampai sekarang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: *Pertama*, pendekatan sosiologis dengan fokus perhatian pada interaksi antara agama, politik, budaya dan masyarakat.¹⁵² Peneliti menggunakan konsep dominasi maskulin dari Bourdieu dan maskulinitas hegemonik dari Connell dan Messerschmidt.

Kedua, pendekatan fenomenologis yang fokus pada pengalaman hidup manusia, yakni apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena (*Textural description*) dan bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya (*Structural description*).¹⁵³ Dalam konteks ini, peneliti menggunakan beberapa konsep dari Pierre Bourdieu yakni habitus, arena, modal, strategi dan distingsi. Dengan teori tersebut diharapkan didapatkan pemahaman yang komprehensif tentang agensi perempuan anggota FKUB berhadapan dengan struktur dan budaya yang maskulin.

Dua pendekatan di atas digunakan secara bersamaan sehingga penggalian data dan investigasi dapat dilakukan secara mendalam, dan interpretasi terhadap data dan pengalaman perempuan lintas agama di FKUB dalam menjaga dan menciptakan kerukunan antaragama untuk perdamaian di masyarakat dapat dimaknai secara mendalam juga.

3. Setting Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis studi kasus di beberapa FKUB di Indonesia. Ada beberapa kategori yang peneliti tentukan berdasarkan riset awal/observasi dalam memilih FKUB mana saja yang cocok untuk penelitian ini. *Pertama*, FKUB dengan jumlah anggota perempuan yang cukup signifikan. *Kedua*, FKUB dengan jumlah anggota perempuan sedikit, tetapi mereka cukup aktif. *Ketiga*,

¹⁵² Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis,” *Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. Peter Connolly, (Yogyakarta: LKIs, 2002), 267.

¹⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IX, 1998), 9

mempertimbangkan FKUB berdasarkan sebaran wilayah, meliputi Indonesia bagian timur (Nusa Tenggara Timur), Indonesia bagian tengah (Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara) dan Indonesia bagian barat (Aceh, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur)

Dilihat dari kategori di atas, dari 300 lebih data kepengurusan FKUB yang diperoleh, peneliti menemukan puluhan FKUB yang memiliki anggota perempuan yang relevan untuk diambil sebagai sumber dalam penelitian ini. Namun demikian, karena isu perempuan seringkali dipandang sebagai masalah yang sensitif, peneliti memilih beberapa FKUB yang responsif atau anggota perempuan FKUB yang peneliti kenal secara pribadi.

Dari langkah-langkah penelitian yang sudah dilalui, peneliti memilih FKUB di 27 wilayah untuk diteliti lebih lanjut. Keduapuluh tujuh wilayah tersebut dipilih dengan merujuk pada beberapa kriteria seperti disebutkan di atas. Secara khusus, FKUB Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih karena merupakan satu-satunya FKUB Provinsi yang ketuanya perempuan dan memiliki total 5 anggota perempuan. FKUB Kalimantan Selatan dipilih mewakili Indonesia bagian tengah, dengan 3 orang anggota perempuan. FKUB Bali (termasuk Kabupaten Karangasem, Bangli dan Klungkung) dipilih karena ada FORPELA (Forum Perempuan Lintas Agama). Khusus FKUB Karangasem juga ketuanya perempuan dan dalam struktur terdapat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda. FKUB Sulawesi Selatan, memiliki 2 orang perempuan anggota FKUB, FKUB Sulawesi Utara (termasuk kabupaten Tomohon, Sangihe dan Minahasa) yang menggambarkan keragaman jumlah anggota FKUB perempuan, dimana Kabupaten Tomohon memiliki 6 anggota perempuan. FKUB Jawa Timur (termasuk Kabupaten Sidoarjo) dipilih dengan pertimbangan isu keberagamannya yang cukup dinamis, meskipun di masing-masing FKUB anggota perempuannya 3 orang. FKUB DIY (termasuk Kota Yogyakarta dan Kulonprogo) dipilih karena peneliti merupakan anggota FKUB Provinsi DIY di mana peneliti memahami konteks.

Sementara FKUB Jawa Tengah (termasuk Kota Semarang) dipilih karena terdapat keunikan di mana Ketua FKUB-nya membuat SK internal untuk memastikan keterlibatan perempuan dan pemuda. Meskipun hanya ada 2 anggota perempuan di FKUB DKI Jakarta, tetapi keduanya sangat aktif dan dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan, baik di internal komunitas agamanya maupun di FKUB. FKUB Lampung (termasuk Kabupaten Tulang Bawang) dimana masing-masing memiliki satu orang anggota FKUB perempuan. Adapun FKUB Sumatera Barat dipilih dengan pertimbangan kekhasan daerahnya dan juga terdapat banyak kasus isu keberagaman. Sementara FKUB Sumatera Utara (termasuk Kota Medan dan Kabupaten Simalungun) dipilih untuk mengakomodir wilayah-wilayah dengan keberagaman yang juga khas. FKUB Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dipilih karena memiliki keunikan dari sisi area, meskipun anggota perempuannya baru satu orang. Terlepas dari penerapan syariat Islam di Aceh yang pada beberapa hal menyebabkan perempuan mendapatkan subordinasi dan diskriminasi, tetapi di FKUB Aceh terdapat 2 anggota perempuan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur awal adalah melakukan studi kepustakaan, dengan pembacaan cermat atas buku, artikel, laporan penelitian, tesis/disertasi, dan sumber dokumen lainnya yang sangat diperlukan untuk memperoleh informasi tentang dialog antaragama, FKUB dan perempuan, serta informasi lain yang relevan. Studi lapangan terfokus pada FKUB yang ada di 27 daerah, seperti yang disebutkan di atas. Karena keterbatasan sumber daya dan kondisi pandemi COVID-19, maka prosedur pengumpulan data lapangan hanya menggunakan dua metode, yakni:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengungkap data terkait profil informan anggota perempuan FKUB dan agensi mereka. Peneliti juga mewawancarai beberapa informan anggota laki-laki FKUB, khususnya pengurus harian FKUB di 27 daerah yang menjadi fokus penelitian ini. Wawancara

dilakukan secara offline dan online melalui zoom atau WhatsApp call/video. Dalam konteks ini, peneliti sudah membangun komunikasi personal dengan beberapa anggota FKUB perempuan dan laki-laki di 27 daerah. Melalui jaringan peneliti di PKUB, di FKUB DIY, dan di lembaga antarimana di beberapa daerah di Indonesia, peneliti mendapatkan kontak person beberapa anggota perempuan FKUB. Selain itu, pada 17-22 November 2021, peneliti mengikuti Konferensi Nasional Asosiasi FKUB se Indonesia di Manado, Sulawesi Utara. Di event besar inilah peneliti melakukan wawancara langsung kepada sebagian informan dan berkenalan dengan sebagian informan lainnya yang tidak sempat melakukan wawancara langsung di sana, tetapi kemudian melakukan wawancara secara online setelah acara Konferensi selesai. Peneliti juga telah melakukan wawancara langsung di tiga lokasi lainnya yakni di Semarang, Bali (Denpasar, Klungkung, Karangasem dan Bangli) dan Yogyakarta (Kota Yogyakarta dan Kulonprogo).

Peneliti telah mewawancarai total 78 informan dari 27 FKUB (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), yang terdiri dari 47 informan perempuan dan 31 informan laki-laki. Adapun rinciannya sebagai berikut:

FKUB	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
Provinsi Aceh	2 orang	2 orang
Provinsi Bali	2 orang	1 orang
Kab. Karangasem	3 orang	
Kab. Bangli	3 orang	3 orang
Kab. Klungkung	3 orang	1 orang
Provinsi DIY	3 orang	1 orang
Kota Yogyakarta	1 orang	1 orang
Kab. Kulonprogo	3 orang	1 orang
DKI Jakarta	2 orang	1 orang
Provinsi Jawa Tengah		2 orang
Kota Semarang	2 orang	3 orang
Provinsi Jawa Timur	2 orang	1 orang
Kab. Sidoarjo	2 orang	1 orang
Provinsi Kalimantan Selatan	2 orang	1 orang

Provinsi Lampung	1 orang	1 orang
Kab. Tulang Bawang	1 orang	1 orang
Provinsi NTT	4 orang	1 orang
Provinsi Sulawesi Utara	1 orang	1 orang
Kab. Minahasa	1 orang	1 orang
Kab. Sangihe	1 orang	1 orang
Kota Tomohon	2 orang	1 orang
Provinsi Sumatera Barat	2 orang	1 orang
Kota Medan	1 orang	1 orang
Kab. Simalungun	1 orang	1 orang
Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	1 orang	1 orang
Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang	1 orang
27 FKUB Provinsi dan Kab/Kota	47 Perempuan	31 Laki-laki

Para informan tersebut dipilih karena mereka merupakan anggota FKUB dari 27 FKUB yang telah dipilih berdasarkan 3 kategori, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, pemilihan para informan juga didasarkan pada ketersediaan mereka untuk diwawancara oleh peneliti, karena tidak semua anggota FKUB yang menjadi subjek penelitian ini bersedia peneliti wawancara. Dari 78 informan yang berhasil peneliti wawancara, informasi utama diambil dari 47 informan perempuan dan sebagian informan laki-laki, khususnya informan yang menjabat sebagai ketua FKUB. Peneliti melakukan wawancara kepada para informan dengan panduan wawancara yang telah disiapkan secara terstruktur, yang meliputi empat jenis pertanyaan yakni pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, pendapat dan perasaan (*daftar pertanyaan terlampir*). Dalam penelitian ini, nama-nama informan ditulis inisialnya.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan profil FKUB dan juga profil narasumber yang menjadi fokus penelitian ini. Sumber dokumentasi ini

adalah buku atau majalah yang diterbitkan oleh FKUB, karya-karya ilmiah terkait dengan FKUB yang menjadi fokus penelitian ini, media online berupa website/blog, dan media sosial (Facebook dan Instagram) yang dimiliki oleh FKUB yang menjadi fokus penelitian ini, dan berita yang relevan. Selain itu, buku-buku, artikel-artikel dan karya tulis ilmiah, seperti tesis dan disertasi, yang berkaitan dengan tema perempuan, kerukunan antaragama, dialog antaragama, dan FKUB akan digunakan sebagai sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵⁴ Semua data mentah yang telah terkumpulkan mengenai FKUB di Indonesia secara umum, mengenai beberapa FKUB yang menjadi fokus penelitian ini dan mengenai anggota FKUB yang menjadi informan dipaparkan dalam file peneliti. Peneliti kemudian membandingkan dan mencari titik temu perbedaan dan persamaan antara data-data tersebut. Berikutnya peneliti melakukan interpretasi hasil dari perbandingan tersebut dengan memakai dua pendekatan secara bersamaan dan bersinergi. Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori, seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, sebagai pisau analisis.

Peneliti menggunakan triangulasi data dengan berusaha melakukan kroscek antara data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dengan data atau fakta empiris yang didapatkan melalui dokumentasi. Dalam hal ini data dari hasil wawancara dengan para informan diperiksa kembali dengan menggunakan data dari hasil observasi dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, data kualitatif yang telah diperoleh divalidasi dengan menggunakan berbagai sumber, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁵⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, (London: Sage Publication, 1998), 12.

Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini dirancang dengan sistematika enam bab.

Bab pertama berisi gambaran umum tentang penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua membahas tentang perempuan, dialog antaragama dan FKUB secara umum. Dalam bab ini diuraikan tentang wacana perempuan dalam dialog antaragama dan dominasi maskulin serta maskulintas hegemonik di dalamnya. Selanjutnya diuraikan tentang sejarah singkat pembentukan FKUB, peraturan terkait dengan FKUB dan peran strategis FKUB. Pada bagian akhir bab ini dibahas lebih dalam tentang peran FKUB dalam dialog antaragama untuk perdamaian di Indonesia.

Bab ketiga menguraikan posisionalitas perempuan dalam FKUB yang memiliki struktur maskulin. Dalam bab ini dikaji tentang bentuk dan praktik dominasi maskulin, bahkan maskulinitas hegemonik di dalam FKUB. Bab ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya dominasi maskulin di FKUB. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang relevansi dominasi maskulin dengan perwujudan kerukunan antaragama di Indonesia. Bab keempat fokus membahas tentang narasi agensi perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang gender, keberagaman dan inklusivitas. Pada bab ini dikaji secara mendalam tentang habitus yang mengonstruksi perempuan di dalam FKUB. Pada bab ini diuraikan juga secara detail tentang modal-modal yang dimiliki oleh para perempuan yang menjadi anggota FKUB, dan bagaimana modal-modal tersebut didayagunakan oleh mereka di dalam lingkungan FKUB. Di bagian akhir bab ini peneliti menggali secara kritis paradigma sejumlah perempuan yang menjadi informan penelitian ini tentang gender dan kepemimpinan perempuan, tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam FKUB, dan tentang keberagaman dan inklusivitas, termasuk tentang dialog antaragama dan perdamaian.

Bab kelima membahas tentang strategi dan distingsi perempuan di dalam FKUB. Pada bab ini, peneliti menganalisis proses rekrutmen anggota FKUB perempuan, dan tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh mereka. Kemudian peneliti menelaah strategi para perempuan menghadapi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, dan distingsi mereka dengan laki-laki di dalam FKUB. Bab keenam berisi kesimpulan, catatan kritis dan rekomendasi dari tema penelitian ini.



BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari kajian disertasi ini, yang mencakup kesimpulan dan saran. Pada bagian awal, peneliti menguraikan secara singkat temuan-temuan dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir, peneliti memaparkan beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, dimana keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat dijadikan peluang oleh peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian serupa di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

FKUB merupakan salah satu lembaga yang unik di Indonesia. Ia memiliki posisi di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai sebuah lembaga yang diinisiasi pemerintah bersama pemuka agama, FKUB dapat membangun hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan sekaligus dengan masyarakat, khususnya berkaitan dengan isu keragaman dan kerukunan antaragama. FKUB tidak hanya berfungsi menjadi wadah bagi tokoh lintas agama untuk berjumpa, berdialog dan melakukan kegiatan bersama, namun juga sebagai pihak yang memfasilitasi dan memediasi konflik yang terjadi di kalangan umat beragama. Sejak awal, FKUB dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan menjaring aspirasi masyarakat tentang pengelolaan kehidupan beragama. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai kritik terhadap FKUB yang muncul dari tahun 2006 hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa FKUB memiliki peran strategis dalam mewujudkan kerukunan dan menumbuhkan perdamaian di masyarakat melalui tugas utamanya memfasilitasi dialog antaragama.

Di tengah perannya yang strategis tersebut, salah satu kelemahan FKUB yang jarang dikaji adalah adanya gap yang sangat lebar antara laki-laki dan perempuan, dimana berdasarkan riset awal peneliti menemukan keterlibatan perempuan hanya 8 persen berbanding 92 laki-laki. Sangat minimnya keterlibatan perempuan di

dalam FKUB tersebut, langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap perwujudan tujuan dari FKUB itu sendiri, yakni memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Padahal perempuan, sama seperti laki-laki, merupakan agen penting dalam menyemai dan merawat toleransi dan kerukunan antaragama, bahkan perempuan memiliki peran sangat krusial di dalam institusi keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis agensi perempuan di tengah-tengah FKUB yang berwajah maskulin.

Tiga pertanyaan utama penelitian ini adalah struktur apa yang berkontribusi terhadap minimnya perempuan dalam FKUB dan konsekuensinya bagi dialog antaragama di Indonesia, bagaimana agensi para perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang gender, keberagaman dan dialog antaragama, dan bagaimana strategi yang digunakan oleh mereka di dalam struktur FKUB yang didominasi struktur maskulin. Riset ini melibatkan tujuh puluh delapan informan, diantaranya empat puluh tujuh informan perempuan dan tiga puluh satu informan laki-laki anggota FKUB dari dua puluh tujuh FKUB Provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data dan pembahasan pada bab tiga, ditemukan empat bentuk dan praktik dominasi maskulin di FKUB, yaitu 1) Ketimpangan sangat lebar antara laki-laki dan perempuan dalam struktur kepengurusan FKUB dimana laki-laki 91,9 persen dan perempuan 8,1 persen, dimana hal ini menunjukkan adanya kenaikan 0,1 persen dalam 3 tahun terakhir; 2) Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, dimana perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan logistik dan administratif, tetapi sangat jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting di FKUB; 3) Pembiasaan gender dalam program-program dan kegiatan-kegiatan FKUB dimana isu perempuan atau kesetaraan gender dipandang oleh sebagian anggota FKUB sebagai isu tidak penting dan tidak terkait dengan isu kerukunan dan perdamaian. Padahal isu perempuan atau kesetaraan

¹ Badan Litbang dan Diklat Departmen Agama RI, *Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departmen Agama RI, 2007), 16.

gender beririsan erat dengan hampir semua isu, termasuk isu sosial, ekonomi, budaya, agama, lingkungan, politik dan lain-lain; dan 4) Penempatan perempuan di lapisan kedua, dimana perempuan hanya diberi sedikit ruang untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya kualitatif-substansial. Padahal kebanyakan mereka merupakan perempuan terdidik, pemimpin di komunitasnya, dan memiliki kapasitas yang mumpuni untuk misalnya menjadi narasumber, moderator, fasilitator atau mediator. Keempat bentuk dan praktik dominasi maskulin tersebut menyiratkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di FKUB.

Penelitian ini menemukan lima faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya hal tersebut di atas, yaitu: 1) Konstruksi sosial atas relasi laki-laki dan perempuan yang patriarkis, seperti pembagian peran dikotomis publik vs domestik, pemosisian laki-laki superior dibanding perempuan, stereotip negatif terhadap perempuan maupun laki-laki, dan struktur organisasi yang maskulin; 2) Problem di internal perempuan sendiri, seperti persaingan tidak sehat, kurang inisiatif dan mindset bahwa perempuan lemah, emosional, subjektif dan sulit menjadi pemimpin; 3) Problem di majelis agama, seperti struktur majelis agama yang *male-dominated*, dan tidak ada *political will* dari majelis agama untuk mengutus perempuan sebagai pengurus FKUB; 4) Bias gender dalam pemahaman terhadap ajaran agama, seperti penafsiran teks kitab suci yang lebih meninggikan laki-laki dibanding perempuan; 5) Ketidakjelasan peraturan pemerintah dan implementasinya, seperti di dalam PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 yang tidak menyebutkan perimbangan anggota berdasarkan jenis kelamin yang berdampak terhadap pandangan bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi anggota FKUB.

Dengan demikian, merujuk pada konsep Connell dan Messerschmidt,² dapat dikatakan bahwa maskulinitas hegemonik hadir di FKUB karena subordinasi perempuan secara struktural maupun kultural. Organisasi-organisasi keagamaan atau majelis-majelis agama

² R. W. Connell dan James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept", *Gender & Society*, Vol. 19 No. 6, (December 2005): 835 dan 844.

yang menjadi basis dari keanggotaan di FKUB juga memiliki struktur dan budaya maskulin dan hegemonik yang secara internal tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin.

Namun demikian, maskulinitas hegemonik tidak menghilangkan hal-hal positif yang ada di FKUB. Penelitian ini menemukan adanya peningkatan jumlah anggota FKUB perempuan di banyak FKUB dan ada beberapa FKUB yang berada di fase rintisan dimana perempuan baru dilibatkan pada periode ketiga kepengurusan. Meskipun peningkatan tersebut belum terlalu signifikan dalam mengeliminir wajah maskulin FKUB, karena masih ada beberapa FKUB yang jumlah perempuannya tetap atau menurun bahkan masih banyak FKUB yang pengurusnya laki-laki semua, akan tetapi fakta ini menunjukkan adanya perkembangan positif yang perlu diapresiasi.

Berdasarkan data penelitian ini, keterlibatan perempuan di FKUB cenderung terus meningkat, khususnya pada periode ketiga kepengurusan lima tahunan. Jika kecenderungan ini semakin berkembang menjadi trend, dimana semakin banyak perempuan terlibat di FKUB, maka peneliti memprediksi kerukunan antaragama akan cepat terwujud di masyarakat, khususnya di kalangan akar rumput.

Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota perempuan FKUB dengan mendorong perubahan habitus baru yang lebih adil gender. Selain itu, ada FKUB yang menggunakan strategi-strategi tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh FKUB Bali yang membentuk Forum Perempuan Lintas Agama (FORPELA) di Bali, dan FKUB Sidoarjo yang membentuk Keluarga Besar (KB) FKUB di mana salah satu bidangnya adalah Komite Pemberdayaan Perempuan, telah berperan penting dalam menyediakan ruang lebih banyak bagi perempuan untuk menjadi agen kerukunan antaragama melalui FKUB. Lebih jauh, di dalam FORPELA dan KB FKUB, perempuan lintas agama dapat lebih leluasa mengartikulasikan gagasan-gagasan dan karya-karyanya dalam upaya menciptakan toleransi dan kerukunan antaragama. Mereka juga akan semakin berdaya dan semakin siap berkontestasi di arena FKUB yang *male dominated*.

Sangat minimnya perempuan di FKUB secara umum dipandang oleh para informan menjadi tantangan bahkan hambatan serius dalam mewujudkan kerukunan antaragama di masyarakat. Maka meningkatkan jumlah perempuan di FKUB secara kuantitas dan memberdayakan perempuan secara kualitas menjadi satu hal yang penting bahkan suatu keharusan. Pandangan seperti ini dapat menunjang implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan pemerintah.

Dalam konteks ini, eksistensi FKUB menjadi sangat penting untuk terus disosialisasikan di level nasional maupun level lokal. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu FKUB, apa saja tugas dan peran FKUB, siapa saja yang terlibat dalam FKUB, bagaimana menjadi anggota atau penerima manfaat FKUB, apa saja program-programnya dan bagaimana pendanaannya. Sebagaimana ditunjukkan data-data penelitian ini, masih banyak masyarakat yang menganggap FKUB sebagai pemadam kebakaran yang lebih banyak berfungsi menyelesaikan konflik sosial keagamaan, daripada fungsi-fungsi pencegahan konflik. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan berinteraksi langsung dengan pengurus FKUB. Oleh karena itu, menjadi tugas pengurus FKUB sendiri untuk memperkenalkan diri dan membuktikan keberadaannya dengan terus menyapa masyarakat melalui berbagai kegiatan konkret di tengah-tengah masyarakat.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai agensi para perempuan dalam FKUB dan perspektif mereka tentang gender, keberagaman dan dialog antaragama, dengan menggunakan konsep Bourdieu tentang praktik sosial³ sebagai kerangka teori, penelitian ini menemukan interaksi antara habitus, arena dan modal yang dimiliki para perempuan anggota FKUB. Penelitian ini menemukan dua habitus utama di FKUB. Habitus pertama adalah bahwa FKUB telah memiliki visi inklusif terhadap perbedaan agama dan etnis tetapi belum memiliki visi inklusif bagi keberagaman gender. Habitus

³ Pierre Bourdieu, *Outline of Theory, Outline of A Theory of Practice*, terj. R. Nice, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 82.

kedua bahwa pemimpin di semua organisasi keagamaan kebanyakan laki-laki sehingga tidak dapat dihindari jika anggota FKUB memiliki mental model yang memandang perempuan sebagai makhluk subordinat dan marginal. Relasi dialektis telah terjadi di antara habitus dan arena, dimana di satu sisi dua habitus tersebut telah mengonstruksi FKUB (arena), dan di sisi lain wajah FKUB juga dibentuk oleh habitus-habitus tersebut.

Namun demikian, habitus-habitus tersebut tidak dibiarkan oleh para informan perempuan. Sebagai agen aktif dan memandang laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek, sebagaimana pandangan Haraway,⁴ ada sebagian anggota FKUB perempuan yang melontarkan kritik, negosiasi, lobby dan tawar menawar, bahkan desakan untuk mengubah situasi maskulin dan tidak adil. Hal tersebut dilakukan karena, pertama, mereka menyadari bahwa perempuan, sebagaimana juga laki-laki, adalah agen penting dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian di masyarakat. Merujuk pada konsep Haraway,⁵ mereka memahami bahwa perempuan dan laki-laki merupakan subjek yang dapat berrelasi membentuk *intersubjectivity* yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, sebagai sesama subjek, mereka meyakini bahwa mereka mampu memengaruhi anggota FKUB laki-laki.

Kedua, terdapat habitus lain yang memengaruhi para perempuan anggota FKUB yakni keyakinan akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan ini lahir karena mereka memiliki perspektif kesetaraan gender yang baik sebagai dampak dari wawasan mereka yang luas dan keaktifan mereka di berbagai organisasi, khususnya organisasi perempuan. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa ada juga anggota FKUB laki-laki yang tidak menerima habitus tersebut, dengan melakukan langkah strategis

⁴ Donna Haraway, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century," dalam *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature* (New York; Routledge, 1991), 159 dan 163.

⁵ *Ibid.*, 180. Lihat juga Donna Haraway, "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s" dalam *Feminism/Postmodernism*, Ed. Linda J. Nicholson, (New York: Routledge, 1990), 35-36.

nyata untuk memberi ruang pada perempuan berkiprah lebih banyak di FKUB seperti yang dilakukan oleh ketua FKUB Bali dan FKUB Sidoarjo. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggota FKUB perempuan dan juga laki-laki, sama-sama berperan signifikan dalam mengkritik sekaligus mengubah bahkan menaturalisasi habitus baru. Ketiga, sebagaimana telah ditunjukkan data-data dan pembahasannya di bab empat, mereka memiliki modal sosial, modal kultural, modal simbolik dan modal ekonomi yang cukup besar.

Mayoritas anggota perempuan FKUB memiliki modal sosial yang besar berupa jaringan sosial dan jaringan organisasi yang cukup kuat karena telah terbangun sejak lama. Hal ini diperkuat dengan modal kultural mereka berupa pendidikan yang tinggi dan beragam profesi, yang kemudian berpengaruh terhadap kemandirian mereka di bidang ekonomi. Semua ini secara signifikan memengaruhi modal simbolik mereka yang juga cukup besar berupa macam-macam jabatan atau posisi penting dan strategis, dan status sosial mereka yang cukup tinggi. Ketiga modal tersebut kemudian berdampak terhadap besarnya modal ekonomi mereka berupa penghasilan yang tinggi dan kepemilikan beragam aset fisik.

Terdapat banyak kesamaan di antara modal-modal yang dimiliki para perempuan anggota FKUB dimana ia sangat dibutuhkan untuk mengubah struktur sosial yang ada di arena, yakni FKUB. Akumulasi dari modal-modal tersebut telah berpengaruh penting terhadap kemampuan mereka untuk memenangkan kontestasi dalam arena. Mereka telah mendayagunakan beragam modal di dalam arena FKUB, sehingga di antara mereka mampu melakukan kritik, negosiasi, bahkan perlawanan. Demikian juga, sifat *transferable* di antara berbagai modal tersebut terlihat jelas, yakni dari modal sosial menjadi modal simbolik, dari modal kultural menjadi modal ekonomi, dan dari modal simbolik menjadi modal ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, dengan modal-modal yang mereka miliki, para perempuan anggota FKUB dapat memainkan agensinya di dalam arena FKUB yang maskulin dan hegemonik.

Dari temuan-temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa sebagai sebuah lembaga yang berisi kumpulan dari berbagai subject yang berbeda agama, suku, usia, pendidikan, profesi, pengalaman, dan *interest*, maka FKUB dapat menjadi wadah yang kaya akan keragaman dan perspektif sehingga ia layak dijadikan laboratorium untuk pengelolaan keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Agen-agen yang ada di dalamnya, termasuk perempuan dan laki-laki, dengan modal-modal yang mereka miliki sesungguhnya memungkinkan lahirnya perubahan habitus FKUB yang pada gilirannya akan mampu membentuk habitus ‘baru’ di FKUB. Yaitu FKUB yang memiliki visi inklusif bagi keberagaman gender, sehingga akan lahir keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dan antara maskulinitas dan feminitas. Lebih lanjut diharapkan muncul kepemimpinan yang *equal* antara laki-laki dan perempuan di organisasi keagamaan dan di FKUB, karena perempuan dipandang sebagai subjek seperti laki-laki, yang tidak boleh dipinggirkan atau tidak boleh disubordinasi.

Untuk tercapainya hal tersebut, menurut hemat peneliti, para perempuan yang ada di FKUB, khususnya, harus melakukan strategi optimalisasi modal-modal yang mereka miliki baik modal sosial, kultural, simbolik maupun ekonomi untuk mendorong terbentuknya habitus baru tersebut, dan menaturalisasinya sehingga tujuan dari FKUB akan tercapai. Jika diamati lebih mendalam, di antara berbagai modal yang dimiliki oleh mereka, di dalam konteks FKUB, modal sosial berupa jaringan yang kuat, dan modal kultural berupa pendidikan tinggi terbukti dapat mengungguli modal-modal lainnya untuk mampu bekontestasi dan bernegosiasi.

Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa modal-modal yang relatif besar yang dimiliki oleh para perempuan anggota FKUB tersebut tidak serta merta berdampak positif terhadap penguatan peran dan otoritas para perempuan di lingkungan FKUB. Kalaupun ada dampaknya, dapat dikatakan sangat kecil, yang dibuktikan dengan masih minimnya posisi kepemimpinan perempuan di lingkungan FKUB. Begitu juga, belum ada relevansi signifikan antara modal-modal besar yang dimiliki oleh anggota perempuan

FKUB dengan paradigma dan praktik kesetaraan gender di lingkungan FKUB. Meski secara umum para perempuan anggota FKUB memiliki perspektif kesetaraan gender yang baik, namun masih ada yang bias gender, termasuk pandangan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dengan syarat ia mampu menyeimbangkan antara peran publik dan domestik, dimana hal yang sama tidak disematkan kepada laki-laki.

Oleh sebab itu, pelibatan perempuan di FKUB, baik sebagai pengurus FKUB maupun sebagai penerima manfaat dari program-program FKUB harus terus ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pengurus FKUB seyogyanya berjumlah minimal 30 persen dari keseluruhan pengurus FKUB yang ada, baik di level kabupaten/kota maupun di level provinsi, sebagaimana menjadi harapan dan pandangan umum para informan baik perempuan maupun laki-laki. Banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat dari kalangan perempuan yang layak menjadi pengurus FKUB. Mereka tersebar di majelis-majelis agama, di organisasi-organisasi perempuan, khususnya organisasi perempuan keagamaan, dan di organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya.

Jika memang tidak mudah mengutus perempuan atas nama majelis agama karena pengurus harian majelis-majelis agama masih dominan laki-laki, maka pengurus FKUB perempuan dapat diminta langsung dari ormas keagamaan perempuan seperti Fatayat, Muslimat, Nasyiatul Aisyiyah, Aisyiyah, WKRI, PWKI, PEKHIN, WHDI, Wanita Buddha, dan lain sebagainya. Metode seperti ini telah dilakukan misalnya oleh FKUB Jawa Timur dan FKUB Kalimantan Selatan. Alih-alih hanya menggunakan perutusan majelis-majelis agama, penggunaan beragam metode dan strategi untuk menjaring perempuan sebagai pengurus FKUB sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan pelibatan perempuan di FKUB.

Selain itu, penelitian ini menemukan enam jenis pola rekrutmen pengurus FKUB perempuan yang dapat dijadikan alternatif ketika sebuah FKUB mengalami kesulitan mendapatkan anggota perempuan. Keenam pola tersebut yakni relasi dan komunikasi personal, penugasan fungsional dari instansi, penetapan

oleh lembaga kepemerintahan, perutusan oleh majelis agama, perutusan oleh organisasi internal agama, dan perutusan oleh organisasi keagamaan perempuan. Meskipun dalam praktiknya keenam pola tersebut cenderung menggunakan pendekatan maskulin, akan tetapi aspek agensi perempuan cukup menonjol yang dipengaruhi oleh habitus yang berkembang di kalangan perempuan anggota FKUB dan modal-modal yang mereka miliki. Namun perlu dicatat bahwa kepemimpinan perempuan di FKUB masih menjadi tantangan tersendiri untuk diwujudkan.

Adapun perspektif para perempuan anggota FKUB mengenai pluralisme dan inklusivitas dapat dikatakan cukup baik dan komprehensif. Hal ini tidak mengherankan karena merupakan konsekuensi logis dari pengalaman mayoritas mereka yang telah berjumpa dan bergaul dengan yang berbeda agama dan etnis sejak usia dini. Maka, penelitian ini juga menemukan bahwa agensi mereka yang cukup kuat di tengah habitus patriarkal telah berkontribusi terhadap praktik berrelasi di antara mereka dengan kolega laki-laki di FKUB yang bersifat setara dan tidak diskriminatif. Sementara itu, mengacu pada konsep dari Swidler,⁶ dialog antaragama di FKUB lebih banyak diperlakukan dengan model dialog *head* yang dikritik elitis dan jauh dari problem riel di Masyarakat. Oleh karena itu, di FKUB perlu dikembangkan model dialog *heart* dan dialog *hand* sehingga kehadiran FKUB akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena bersentuhan langsung dengan problem dan kebutuhan mereka sehari-hari.

Beralih ke pertanyaan penelitian ketiga tentang strategi yang digunakan oleh para perempuan di dalam struktur FKUB yang didominasi struktur maskulin. Peneliti menemukan setidaknya lima strategi yang telah digunakan oleh para perempuan anggota FKUB untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang ada ketika mereka ber-FKUB, yakni 1) Komunikasi asertif, yakni membangun

⁶ Leonard Swidler, *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*, (New York: Palgrave MacMillan, 2014), 47-51. Lihat juga <https://dialogueinstitute.org/what-is-dialogue>, diakses pada 19 Mei 2023.

dan menjaga komunikasi yang baik, jujur dan terbuka serta bersikap tegas dan berani dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada dan dalam mengupayakan terbentuknya habitus baru yang lebih adil gender; 2) Suportif, yakni saling mendukung di antara anggota perempuan (*women supporting women*) untuk memperkuat posisi dan pengaruh perempuan di FKUB; 3) Edukasi, yakni dengan terlibat dalam berbagai jejaring ulama seperti JP3M dan KUPI, serta MPU dan pendidikan sebaya kepada sesama perempuan untuk meminimalisir dominasi maskulin di FKUB; 4) Suksesif, yakni menyiapkan kader perempuan baik untuk duduk sebagai anggota FKUB maupun untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan FKUB seperti melalui FORPELA Bali dan Keluarga Besar (KB) FKUB Sidoarjo; dan 5) Intervensi, yakni memanfaatkan otoritas yang dimiliki oleh anggota perempuan FKUB untuk melakukan intervensi kepada majelis agama agar mengutus perempuan menjadi anggota FKUB dan meminta secara argumentatif adanya keterwakilan perempuan sebagai narasumber atau fasilitator di setiap kegiatan untuk meningkatkan perlibatan perempuan di FKUB, baik sebagai anggota maupun sebagai penerima manfaat.

Penelitian ini juga menemukan beberapa distingsi khas perempuan, yakni 1) Gaya berkomunikasi, dimana anggota FKUB perempuan dinilai lebih luwes dalam berkomunikasi, sehingga pesan lebih mudah tersampaikan dan masalah dapat teratasi dengan baik karena kemampuan negosiasi yang baik; 2) *Detail oriented skill*, dimana perempuan lebih memperhatikan hal-hal detail dibanding laki-laki, termasuk dalam membuat perencanaan atau melihat persoalan; 3) *Soft approach*, dimana perempuan dipandang memiliki tendensi untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang lunak dan lebih fokus pada proses daripada hasil dalam menyelesaikan konflik.

Distingsi ini tidak hanya menunjukkan gaya, kecenderungan dan model yang khas perempuan, tetapi sesuatu yang tidak dimiliki dan digunakan oleh laki-laki. Dengan demikian, pengalaman yang khas perempuan tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan penting, di tengah-tengah realitas androsentrisme, dalam kajian sosiologi, khususnya terkait dengan isu perempuan, toleransi, dialog dan

perdamaian. Ketiga distingsi tersebut juga menjadikan FKUB lebih dinamis karena adanya keseimbangan antara sifat maskulin dan feminin.

Berbagai strategi dan distingsi tersebut telah memperkuat agensi para perempuan di FKUB, termasuk dalam rangka mengubah habitus yang lebih seimbang dan adil gender. Perubahan dan terobosan yang dilakukan oleh mereka juga ditopang oleh perspektif kesetaraan gender yang dimiliki oleh beberapa laki-laki anggota FKUB, yang berakibat meningkatnya kuantitas perempuan di FKUB meskipun belum signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk membangun struktur dan budaya adil gender, sehingga kerukunan dan perdamaian akan terwujud di masyarakat melalui pelibatan penuh laki-laki dan perempuan baik di lembaga-lembaga keagamaan maupun di FKUB.

Kombinasi antara strategi dan distingsi para perempuan anggota FKUB tersebut memungkinkan mereka dapat berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat terkait isu toleransi, rumah ibadat, dan lain-lain, dan dengan demikian tujuan FKUB dapat tercapai dengan baik. Sementara itu, para perempuan anggota FKUB juga tidak sepenuhnya terpisah dari aspek-aspek kepemimpinan di FKUB, yang masih didominasi oleh laki-laki. Peran strategis mereka lebih ditentukan oleh upaya mereka sendiri dan juga sebagian pimpinan mereka untuk mengubah habitus yang selama ini ada. Hal ini termasuk memastikan jumlah representasi perempuan di dalam FKUB, peran dan tugas mereka yang lebih substansial, agar FKUB benar-benar berfungsi sebagai forum yang mendorong terwujudnya kerukunan dan perdamaian di masyarakat.

Berkaca pada teori Bourdieu dan Haraway, secara teoretis, pembentukan habitus baru dan naturalisasinya, sebagaimana disebutkan di atas, dimungkinkan terjadi di FKUB di masa yang akan datang. Syaratnya adalah struktur dan kultur yang maskulin dan hegemonik dapat dieliminir dengan meningkatkan keterlibatan perempuan secara kuantitas maupun kualitas di dalam FKUB, dan

anggota FKUB diisi oleh orang-orang yang kapabel dalam isu keberagaman dan memiliki perspektif gender.

Apabila wajah FKUB tetap atau tidak berubah, maka bukan saja tujuan ber-FKUB sulit untuk dicapai, tetapi juga melanggengkan habitus yang maskulin, bahkan hegemonik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan penting di dalam pelibatan perempuan di FKUB baik secara kuantitas maupun kualitas, yang ditopang oleh banyak faktor, termasuk modal-modal yang dimiliki perempuan dan berbagai strategi yang telah dilakukan baik secara individual maupun institusional. Meskipun perubahan tersebut belum menjadi trend saat ini, akan tetapi peneliti memprediksi dalam satu atau dua decade ke depan, peran dan posisi laki-laki dan perempuan di FKUB akan setara (*equal*).

B. Saran-saran

Sebagai sebuah entitas publik dengan peran yang cukup strategis dalam mengelola keberagaman agama dan etnis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, serta eksistensinya yang terstruktur dan massif, maka FKUB sangat layak dan masih terbuka lebar untuk diteliti lebih lanjut dari berbagai segi. Misalnya terkait dengan isu perempuan, anak muda dan relevansi FKUB di tengah era disruptif, serta kajian FKUB berbasis lokus tertentu yang memiliki konteks dan problem yang berbeda-beda satu sama lain.

Penelitian ini hanya mengungkap agensi perempuan di FKUB dengan sisi cakupan wilayah sebagian kecil FKUB, belum secara komprehensif mengkaji keseluruhan FKUB yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana agensi perempuan di FKUB-FKUB lainnya di Indonesia menjadi penelitian yang penting untuk dilakukan dan akan memperkaya penelitian mengenai agensi perempuan di lembaga antaragama.

Demikian juga, riset lebih lanjut yang memotret peran dan kontribusi perempuan dalam lembaga-lembaga antaragama, termasuk FKUB, dalam menciptakan kerukunan antaragama dan perdamaian di Indonesia sangat layak dilakukan. Apalagi dengan semakin meningkatnya perspektif kesetaraan gender di kalangan para pemuka

agama, akan semakin banyak perempuan yang terlibat di FKUB di masa yang akan datang, maka penelitian mengenai dinamika dan pengalaman perempuan dalam menciptakan kerukunan antaragama menjadi suatu keharusan untuk dikerjakan.

Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada agensi perempuan di FKUB dengan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan sosiologis. Maka kajian tentang agensi dan peran perempuan di FKUB dengan menggunakan pendekatan lain, termasuk pendekatan etnografis, antropologis, teologis, dan lain sebagainya menjadi signifikan untuk dilakukan. Sehingga agensi perempuan dalam konteks menciptakan kerukunan antaragama di Indonesia akan tergambar secara lebih mendalam dan komprehensif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi tentang FKUB di Indonesia, dan memperkaya khazanah keilmuan mengenai perempuan, dialog antaragama dan perdamaian di Indonesia dan di Asia Tenggara. Terakhir, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berarti bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan pemerintah terkait dengan upaya merawat dan mengembangkan kerukunan antaragama dan perdamaian di Indonesia dengan pelibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Abu-Nimer, Mohammed. “Religion and Peacebuilding: Reflections on Current Challenges and Future Prospects,” in *Journal of Interreligious Studies*, Issue 16 (March 2015): 14-29.
- _____, and Renáta Katalin Smith, “Interreligious and intercultural education for dialogue, peace and social cohesion,” *International Review of Education*, Vol. 62, No. 4 (2016): 393-405.
- _____, *Evaluating Interreligious Peacebuilding and Dialogue Methods and Frameworks*, edited by Mohammed Abu-Nimer and Renáta Katalin Nelson, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021.
- Adamson, Clarissa. “Islam, Women's Rights, and Moral Hierarchy in Java,” *Anthropological Quarterly*, Vol. 80, No. 1 (Winter, 2007): 5-37.
- Adi, Suwarto. “Perempuan Kristen Jawa dan Kewirausahaan Pendeta: Negosiasi antara Identitas dan Institusi Keagamaan,” *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. XXVIII No. 1 (2019): 29-52.
- Adib, Muhammad, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu,” *BioKultur*, Vol.I No.2 (Juli- Desember 2012).
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, dkk, *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, Yogyakarta: CRCS, 2015.
- Aminah, Wiwin Siti. “Perempuan, Dialog, dan Perdamaian Pascakonflik: Pengalaman Institut Mosintuwu”, *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di*

Indonesia dan Belanda, editor: Suhadi. Yogyakarta: CRCS UGM, 2018.

Ansori, Mohammad Hasan. "Linking Identity to Collective Action: Islam, History and Ethnicity in the Aceh Conflict," *Studia Islamika*, Vol. 19, No. 1 (2012): 1-47.

Anwar, Etin. *A genealogy of Islamic Feminism: Pattern and Change in Indonesia*. New York: Routledge, 2018.

_____. *Gender and Self in Islam*. New York: Routledge, 2006.

Arar, Khalid dkk. *Women in Educational Leadership and Community Building: Voices from Across the Globe*. New York: Routledge, 2023.

Arawi, Fadia Amelia dan Haura Atthahara. "Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina," *Politeia*, Vol. 4, No.2 (2016): 74-85.

Arifin, Muhammad dan Khadijah Binti Mohd Khambali. "Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh: Studi terhadap Ritual Rah Ulei di Kuburan dalam Masyarakat Pidie Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2 (Februari 2016): 251-284.

Aritonang, Jan Sihar and Karel Steenbrink. *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: Brill, 2008.

Arlina, Feni. "Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, Nomor 4 (2019): 1707-1718.

Arora, Veenat dan Anil Kumar Mishra. "Women and Religion: Portrayal of Women in Christianity and Islam," *SAMAJBODH The Journal of Social Understanding*, Vol. 6, No-1 (Jan-June 2016): 111-120.

ASEAN IPR Secretariat, *ASEAN Women Interfaith Dialogue: Promoting Understanding for an Inclusive and Peaceful Society*, Jakarta, 12-13 November 2019

Asrinaldi, dan Yoserizal. "Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 33, Issue 2, (2020): 162-173.

Avishai, Orit. "Doing Religion" in a Secular World Women in Conservative Religions and the Question of Agency," *Gender & Society*, Vol. 22 No. 4 (August 2008): 409-433.

Bagir, Zainal Abidin, dkk.. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2012*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2013.

_____. *Studi Antaragama: Metode dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

_____. *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: CRCS, 2019.

_____. *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*. Yogyakarta: CRCS, 2017.

Banawiratma, J.B. "Contextual Theology and the Dialogical Building Block of Democracy" dalam editor Alan and Ingrid Shafer, *Religions in Dialogue: from Theocracy to Democracy*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2022.

_____, dkk. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2010.

Barazangi, Nimat Hafez. *Women's Identity and Rethinking the Hadith*. New York: Routledge, 2015.

Baum, F. E. and A. M. Ziersch. "Social Capital," *Journal of Epidemiology and Community Health* (1979-) , Vol. 57, No. 5 (May 2003) : 320-323.

- Berger, Peter L. & Thomas Luckman. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday, 1967.
- Bourdieu, Pierre. "First Lecture, Social Space and Symbolic Space: Introduction to a Japanese Reading of Distinction," *Poetics Today*, Vol. 12, No. 4, National Literatures/Social Spaces, (Winter 1991): 627-638.
- _____. "Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field," terj. Loïc J.D. Wacquant dan Samar Farage, *Sociological Theory*, Vol. 12, No. 1 (March 1994): 1-18.
- _____. "Scattered Remarks," terj. Tarik Wareh and Loïc Wacquant, *European Journal of Social Theory*, Vol. 2 No. 3, Sage Publications: London, Thousand Oaks, CA and New Delhi 1999.
- _____. "Social Space and Symbolic Power," *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989): 14-25.
- _____. "The Forms of Capital," Richardson, J., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood, 1986.
- _____. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- _____. *Dominasi Maskulin, (La Domination Masculine)* penterjemah: Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- _____. *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. (Trans) Matthew Adamson. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- _____. *Outline of A Theory of Practice*, (trans.) R. Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

- _____. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Polity Press, 1977.
- _____. *The Field on Cultural Production: Essays on Art and Literature*, Cambridge, Polity Press, 1993.
- _____. *The logic of practice*, terj. Nice, R. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Bräuchler, Birgit. "Diverging Ecologies on Bali," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 33, No. 2 (2018): 362–396.
- Brizendine, Louann. *Mengungkapkan Misteri Otak Laki-laki*. Jakarta: Phonix Publishing Project, 2010.
- Brooks, Abigail. "Feminist Standpoint Epistemology: Building Knowledge and Empowerment through Women's Lived Experience," *Feminist Research Practice: A Primer*, Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage Publications, 2007.
- Budgeon, Shelley. "The Dynamics of Gender Hegemony: Femininities, Masculinities and Social Change," *Sociology*, Vol. 48, No. 2 (April 2014): 317-334.
- Buisson, Johanna Marie. "Interfaith Marriage for Muslim Women," *Cross Currents*, Vol. 66, No. 4, Voices from The Margins (December 2016): 430-449.
- Burke, Kelsy C. "Women's Agency in Gender-Traditional Religions: A Review of Four Approaches," *Sociology Compass*, 6/2, (2012): 122-133.
- Clark, Kelly James and Robin R. Wang. "A Confucian Defense of Gender Equity," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 72, No. 2 (June 2004): 395-422.
- Cockburn, Cynthia. "Maskulinitas, Kiri dan Feminisme", dalam Chapman, Rowena and Rutherford, Jonathan, *Male Order*. London: Lawrence & Wishart Ltd, 1988.

- Connell, R.W. "Gender, Men, and Masculinities", *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), t.t.*
- _____. "Understanding Men: Gender Sociology and the New International Research on Masculinities," paper presented at Clark Lecture, University of Kansas, September 19, 2004.
- _____. *Gender and Power*. California: Stanford University Press, 1987.
- _____. dan James W. Messerschmidt. "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept", *Gender & Society*, Vol. 19 No. 6, December 2005.
- Crowley, Kacy and Michelle Sandhoff. "Just a Girl in the Army: U.S. Iraq War Veterans Negotiating Femininity in a Culture of Masculinity," *Armed Forces & Society*, Vol. 43, No. 2 (April 2017): 221-237.
- d'Ambar, Sebastian, *Life in Dialogue: Pathways to Inter-religious Dialogue and the Vision-Experience of the Islamic-Christian Silsilah Dialogue Movement*, Philipina: Silsilah Publications, 1991.
- D'Souza, Diane. *Gendered Perspectives on Interfaith Dialogue* presented at the consultation "Ecclesia of Women in Asia: Voices of the Silenced" di Bangkok, Thailand, in November 2002.
- Dahlan, Faisal Zaini. "Elok Di Awak, Katuju Dek Urang: Nilai Multikultural di Minangkabau," *Tajdid*, Vol. 16, No.1 (Juli 2013): 3-24.
- Deviani, dan Nur Iman Subono. "Perempuan dan Politik di Ranah Minang," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2022): 25-35.
- Diantoro, Suhajar. "Alokasi Anggaran Hibah FKUB Tahun Anggaran 2022 – 2023," materi dari Kementerian Dalam Negeri RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 28 Februari 2023 di Tangerang

- Doorn-Harder, Nelly van, "Women's Agency and Role in Inter-Religious Dialogue Indonesia - the Netherlands, dalam *Muslim Christian Relations Observed Comparative Studies from Indonesia and the Netherlands*, Eds. Volker Kilster and Robert Setio. Leizig: Evangelische Verlagsanstalt GmbH, 2014.
- Dwiyanti, Nova, "Peran Komunikasi Pengurus FKUB Dalam Mencegah Konflik Antar Umat Beragama Di Kota Batam," dalam *DIMENSI*, Vol. 6, NO. 3 (November 2017): 491-502.
- Eagleton, Terry, and Pierre Bourdieu, "Doxa and Common Life," *New Left Review, London*, Vol. 0, Iss. 191 (Jan 1, 1992): 111-121.
- Egnell, Helene, "Dialogue for Life – Feminist Approaches to Interfaith Dialogue," dalam Karin Sarja, dkk., *Gender, Poverty and Church Involvement*, A Report from a Research Conference in Uppsala, May 6-8, 2002, Electronic Publishing Center, Uppsala University.
- Ehmer, et. Al, Ariel. *Accommodating Identity In Youth Religious Peacebuilding Programs*. Search for Common Ground, 2017.
- Ekowati, Wilis Rengganiasih Endah. "The Controversy of Bhikkhuni Ordination (Upasampada) Within Theravada Buddhism in Indonesia," *Tesis* pada CRCS UGM, 2006.
- Ensmenger, Nathan. "Beards, Sandals, and Other Signs of Rugged Individualism": Masculine Culture within the Computing Professions, *Osiris*, Vol. 30, No. 1, Scientific Masculinities, (January 2015): 38-65.
- Esack, Farid. *Membebaskan yang Tertindas: Al Quran, Liberalisme, Pluralisme*. Terj. Watung A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.
- Eysenck, Hans J. "Masculinity-Femininity, Personality and Sexual Attitudes," *The Journal of Sex Research*, Vol. 7, No. 2 (May 1971): 83-88.

Fadhilah, Iman, "Konflik Keagamaan (Studi Terhadap Posisi FKUB Dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan Di Jawa Tengah," *Disertasi* pada Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2020.

Fahy, John & Jan-Jonathan Bock. *Beyond Dialogue? Interfaith Engagement in Delhi, Doha & London.* Georgetown University in Qatar, 2018.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Fardius, Yelmi Eri. "Nilai-nilai Filosofis ABS-SBK di Minangkabau," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 2 (November 2017): 63-64.

Farhadian, Charles E. *Christianity, Islam, and Nationalism in Indonesia.* New York: Routledge, 2005.

Fauzi, Ihsan Ali, dkk. *Kontroversi Gereja di Jakarta.* Yogyakarta: CRCS, 2011.

_____. *Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB,* Jakarta: PUSAD Paramadina, 2018.

Febriani, Ina Salmah. "Keseimbangan Karakter Feminin Dan Maskulin Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani," *Tsaqôfah: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 19 No. 01 (Januari-Juni 2021): 45-61.

Féron, Élise, "Gender and Peace Negotiations Why Gendering Peace Negotiations Multiplies Opportunities for Reconciliation," dalam *PIN Policy Brief*, Agustus 2015.

Firdaus, Muhammad Anang, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," in *Kontekstualita*, Vol. 29, No. 1 (2014): 1-23.

Fletcher, Jeannine Hill. "Women in Inter-Religious Dialogue," in *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue.* Ed. Catherine Cornille, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013.

- Formichi, Chiara. "The Limits of Pancasila as a Framework for Pluralism," *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy*. Editor Chiara Formichi, Cornell: Cornell University Press, 2021.
- Freeman, Carla. "Is Local: Global as Feminine: Masculine? Rethinking the Gender of Globalization," *Signs*, Summer, 2001, Vol. 26, No. 4, Globalization and Gender (Summer 2001): 1007-1037.
- Fukuyama, Francis. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.
- Gao, Xiaoyuan. "How can Confucian Philosophies Contribute to Gender Equality in Chinese Organisations?," tesis pada Faculty of Business, Law and Economics, Auckland University of Technology, 2020.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. London and Chicago: the University of Chicago Press, 1976.
- Giddens, Anthony, *Central Problems in Social Theory Central Problems in Social Theory*, London: Macmillan Education Ltd, 1979.
- _____. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Edisi ke-2, Berkeley: University of California Press, 1986.
- Goetz, Stephan J., Anil Rupasingha and Scott Loveridge. "Social Capital, Religion, Wal-Mart, and Hate Groups in America," *Social Science Quarterly*, Vol. 93, No. 2 (June 2012): 379-393.
- Gogali, Lian, dkk., *Perempuan, Konflik dan Perdamaian: Tuturan Perempuan Korban dan Penyintas Konflik dan Perdamaian di Poso, Ambon dan Atambua*, Kupang: JPIT, 2021.
- _____. *Konflik Poso: Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*. Yogyakarta: Galang Press, 2009.

Halidin, Ali. "Identitas Gender dalam Perspektif Agama Kristen," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2017): 25-44.

Haraway, Donna. "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s" dalam *Feminism/Postmodernism*. Ed. Linda J. Nicholson, New York: Routledge, 1990.

_____. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century," dalam *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*. New York: Routledge, 1991.

Haryatmoko, "Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam *Basis* No. 11 – 12, Tahun Ke-52, (November – Desember 2003)

Hasyim, Syafiq. *Understanding Women in Islam: an Indonesian Perspective*. Jakarta: Solstice Publishing, 2006.

Hearn, Jeff, dan David L. Collinson. "Theorizing Unities and Differences between Men and Between Masculinities", *Theorizing Masculinities*. Editor Harry Brod dan Michael Kaufman, Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994.

Hefner, Robert dan Ihsan Ali Fauzi. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi*. Yogyakarta: CRCS, 2014.

Hidayat, Rachmad. "Santri, Kyai and Ulama Framing Masculinity within Indonesian Religious Elites", tulisan dipresentasikan pada International Workshop on Masculinities in Asia, 4-5 August 2011.

_____. "'My Wife is the Boss': Muslim Men Negotiating Masculinity in Australia," *Muslim Identity Formation in Religiously Diverse Society*. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 2015.

- _____. “Masculinities, Islam and Domestic Violence in Java,” tesis pada School of Political and Social Inquiry, Faculty of Arts, Monash University, 2009.
- Hidayatno, Akhmad. *Berpikir Sistem Pola Berpikir Untuk Pemahaman Masalah yang Lebih Baik*. Jakarta: UI, 2013.
- Huppertz, Kate. “Reworking Bourdieu’s “capital”: Feminine and Female Capitals in the Field of Paid Caring Work,” *Sociology*, Vol. 43, No. 1 (2009): 45-66 .
- Hutahaean, Hasahatan, dkk. “Persamaan Status Laki-laki dan Perempuan dalam Pandangan Allah menurut 1 Korintus 11:7-11,” *Phronesis: Jurnal teologi dan Misi*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2022): 108-121.
- Idris M.Ag., Dr. Muhammad, M.Ag, Drs. Ikrar, M.HI, Ikmal, M.Pd.I, “Peran FKUB Provinsi Sulawesi Utara Dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama di Manado,” Laporan Penelitian Kompetitif SATIN Manado, 2013.
- Ismail, Nawari. “Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat”, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2016.
- Itulua-Abumere, Flourish, “Understanding Men and Masculinity in Modern Society”, *Open Journal of Sosial Science Research (OJSSR)*, No. 1 (2013): 155-164.
- Izzaty, Fadhlila, Mugiyono dan Herwansyah. “Bhikkhuni and Gender Equality in the Vihara Dharmakirti Palembang, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2021): 172-179.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 26, Issue 2 (November 2022): 152-167.

Juliano P, Sangra, "Komunikasi dan Gender : Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminim," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. V, No.I (Juni 2015): 19-30.

Kantzara, Vasiliki. "Prestige," *Blackwell Encyclopedia of Sociology*, George Ritzer (editor), Blackwell Publishing, 2009.

Katsir, Ibnu. *Tafsir al Quran al 'Adzim*, ditahqiq oleh Syaikh Sami bin Muhammad Salamah, Jilid II, Riyadh: *Dar al Thayyibah lii An Nasyr wa At-Tauzii*', 1999.

Kaufman, Michael. "Men, Feminism, and Men's Contradictory Experiences of Power", *Theorizing Mazculinities*. Editor: Harry Brod dan Michael Kaufman, Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994.

Kedu, Loisa De Marilak Gendi. "Strategi Partai Politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilu Tahun 2024," *Tesis* pada program Diploma Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Juni 2023.

Kim, Heisook. "The Ethics of Contingency: Yinyang," dalam *Confucianisms for a Changing World Cultural Order*. Editor Roger T. Ames and Peter D. Hershock, University of Hawai'i Press: East-West Center, 2018.

Kimmel, Michael. "Masculinity as Homophobia: Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity", *Theorizing Mazculinities*. Editor: Harry Brod dan Michael Kaufman, Thousand Oaks, London and New Delhi: SAGE Publication, 1994.

King, Ursula. "Gender and Interreligious Dialogue", *East Asian Pastoral Review*, Vol. 44, No. 1 (2007): 52-67.

Klingorová, Kamila and Tomáš Havlíček. "Religion and Gender Inequality: The Status of Women in the Societies of World Religions, in *Moravian Geographical Reports*, Vol. 23, No.2 (2015): 2-11.

- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Koeszegi, Sabine T. Eva Zedlacher and René Hudribusch. "The War against the Female Soldier? The Effects of Masculine Culture on Workplace Aggression," *Armed Forces & Society*, Vol. 40, No. 2 (April 2014): 226-251.
- Krier, Jennifer. "The Marital Project: Beyond the Exchange of Men in Minangkabau Marriage," *American Ethnologist*, Vol. 27, No. 4 (Nov 2000): 877-897.
- Krisdinanto, Nanang, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai," *Kanal*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2014): 189-205.
- Kung, Hans. *Christianity, and the World Religions: Paths of Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism*. New York: Doubleday & Company, 1986.
- Kunz, Rahel, Henri Myrttinen & Wening Udasmoro. "Preachers, pirates and peace-building: Examining non-violent hegemonic masculinities in Aceh," dalam *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 24, No. 3 (2018): 299-320.
- Labesge, Suzanne. "Toward an Integration of Gender into Bourdieu's Concept of Cultural Capital, *Sociology of Sport Journal*, (June, 1995): 132-146.
- Lakoff, Robin. "Language and Woman's Place," *Language in Society*, Vol. 2, No. 1 (April, 1973): 45-80.
- Lancee, Bram. *Immigrant Performance in the Labour Market Book: Bonding and Bridging Social Capital*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- Lovell, Terry. "Thinking Feminism with and Against Bourdieu," *Feminist Theory*, Vol. 1, No. 1, (2000): 11-32.
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017.

- Maden, Pdt. Kinurung M., dkk “Antara Layanan Profesional Dan Panggilan,” *Pambelum Jurnal Teologi*, Vol. 3 No. 2, (November 2011): 1-16.
- Madur, Maria Theresia Ngindang. “Politik dan Perempuan: Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024,” tesis pada program Diploma Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Juni 2022.
- Maguire, Patricia. *Doing Participatory Research: A Feminist Approach*. Massachusetts: The Centre for International Education, 1987.
- Mangun, Nuhdiatul Huda. “Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik (Kerusuhan) Poso,” *Jurnal Perempuan*, No 24 (2002)
- Mäntylä, Timo. “Gender Differences in Multitasking Reflect Spatial Ability,” *Psychological Science*, Vol. 24, No. 4 (April 2013): 514-520.
- Marie, Rose, Hoffman Johna Hattie and L. Dianne Borders, “Personal Definitions of Masculinity and Femininity as an Aspect of Gender Self-Concept,” *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, Vol. 44, Issue 1 (Spring 2005): 66-83.
- Mc Leod, Julie. “Feminists Re-reading Bourdieu Old Debates and New Questions about Gender Habitus and Gender Change,” *Theory and Research in Education*, Vol 3, No.1 (2005): 11-30.
- McCall, Leslie. “Does Gender Fit? Bourdieu, Feminism, and Conceptions of Social Order,” *Theory and Society*, Vol. 21, No. 6 (1992): 837–867.
- Menchik, Jeremy. “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia,” *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 56, No. 3 (July 2014): 591-621.

- Merdjanova, Ina. "Overhauling Interreligious Dialogue for Peacebuilding," *Religion in Eastern Europe*, Vol. 36: Iss. 1, Article 3 (2016): 26-33.
- Meuleman, Johan. "Between Unity and Diversity: The Construction of The Indonesian Nation," *European Journal of East Asian Studies*, Vol. 5, No. 1 (2006): 45-69.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. London: Sage Publication, 1998.
- Mir, Ghazala, John Lawler and Mary Godfrey. "Chapter Heading Women, Faith and Social Cohesion: Models for Building Cohesive Communities," a Report Research by Joseph Rowntree Foundation, July 2010.
- Moi, Toril. "Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu's Sociology of Culture," *New Literary History*, Vol. 22, No. 4 (1991): 1017-1049.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IX, 1998.
- Montgomery, John D, "Social Capital as a Policy Resource," *Policy Sciences*, Vol. 33, No. 3 (2000): 227-243.
- Moordiningsih, dkk. "Indonesian National Identity Model: The Importance of Religion, Self-Esteem, and Relations between Groups Among Muhammadiyah Students," *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 9, No. 2 (2021): 150-174.
- Moore, Rob. "Cultural Capital: Objective Probability and the Cultural Arbitrary," *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 25, No. 4, Special Issue: Pierre Bourdieu's Sociology of Education: The Theory of Practice and the Practice of Theory (September 2004): 445-456.
- Morgan, Erin. "Masculinity and Femininity in the Corps," *Race, Gender & Class*, Vol. 14, No. 3/4 (2007): 117-130

- Mubarok, Husni. "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)," *Dialog*, Vol 37, No. 2, (Desember 2014): 197-208.
- Mufrikhah, Solkhah. "Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol 2, No 2 (2020): 47-66.
- Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Chritian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press, 2006.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*. Malang: Madani, 2017.
- Munjid, Achmad. *Building a Shared Home: Investigating the Intellectual Legacy of the Key Thinkers of Inter-religious Dialogue in Indonesia*, disertasi pada Temple University, Philadelphia, 2014.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought*. Albany, N.Y State: University of New York Press, 1992.
- Newman, John, ed. *Masculinities, conflict and peacebuilding: Perspectives on men through a gender lens*. Saferworld, 2014
- Ngebu, Johannis Fiani. "The Marriage Construction and Social Stratification of Bajawa Peoples at Ngada Regency, East Nusa Tenggara Indonesia," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 6, No. 2 (January 2018): 585-588
- Noor, Nina Mariani. *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution A Case Study on Active Group Resistance in Indonesia*. Switzerland: Globethics.net, 2017.
- Northcott, Michael S. "Pendekatan Sosiologis," *Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. Peter Conolly. Yogyakarta: LKiS, 2002.

- Nur Ichwan, Moch, Arskal Salim & Eka Srimulyani. "Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia," *Islam and Christian–Muslim Relations*, Vol. 31, No, 2 (Juli 2020): 1-26.
- _____. "Official Ulema and The Politics Of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 2 (May 2011): 183-214.
- Nurhayati, Cucu, A. Bakir Ihsan dan Muhammad Farras Shaka. "The influence of social media on religious identity politics among Indonesian millennial generation," *Simulacra*, Vol. 5, Issue 2, (November 2022): 57-70.
- Nursyifa, Sri dan Neng Hannah. "Objektifikasi Tubuh Perempuan Sebagai Akar Kekerasan Seksual: Studi Pemikiran Michel Foucault," *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022): 288-317.
- Offer, Shira and Barbara Schneider. "Revisiting the Gender Gap in Time-Use Patterns: Multitasking and Well-Being among Mothers and Fathers in Dual-Earner Families," *American Sociological Review* , Vol. 76, No. 6 (December 2011): 809-838.
- Ogunsanya, Kemi and Kwezi Mngqibisa, "A Gender Perspective for Conflict Management," in *Occasional Paper*, No. 4 (2000): 1-17.
- Parker, Lyn, Chang-Yau Hoon and Raihan. "Young people's attitudes towards interethnic and inter-religious socializing, courtship and marriage in Indonesia," *South East Asia Research* , Vol. 22, No. 4, Special Issue: Education For A Tolerant And Multicultural Indonesia (December 2014): 467-486.
- Petkeviciute, Nijole and Dalia Streimikiene. "Gender and Sustainable Negotiation," in *Economics & Sociology*, Vol. 10, No . 2 (2017): 279-295.

- Potter, Mary. "Gender Equality and Gender Hierarchy in Calvin's Theology," *Signs*, Vol. 11, No. 4 (Summer 1986): 725-739.
- Pratama, Laurentius Melvin. "Panggilan Khusus: Menjadi Imam dan Biarawan-Biarawati," *Warta Sanmare*, Vol. XII, No. 07 (April 2021): 1-16.
- PUSAD Paramadina. "Memperkokoh Kerukunan Kita: Beberapa Masukan ke Arah Penguatan Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 (PBM 2006)," *Kertas Posisi Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina*, Juli 2020.
- _____. "Memperkuat Kapasitas Kelembagaan FKUB di Indonesia," temuan dari Pangkalan Data 2018-2021.
- _____. *Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data*. Jakarta: PUSAD, Maret 2020.
- Qodir, Zuly, Hasse Jubba, & Mega Hidayati, "Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections: Political Polarization in West Kalimantan," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 29, No. 1 (2022): 111-142.
- Rahman, M. Taufiq. *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Bandung: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Rawski, Frederick and John Macdougall. "Regional Autonomy and Indigenous Exclusivism in Bali," *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol. 11, No. 1/2 (2004):143-157
- Reinharz, Shulamit. *Feminist Methods in Social Research*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Rey, Terry. *Bourdieu on Religion Imposing Faith and Legitimacy*. New York: Routledge, 2014.
- _____. "Marketing the goods of salvation: Bourdieu on religion," *Religion*, Vol. 34 (2004): 331-343.

- Rinaldo, Rachel. *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. New York: Oxford University Press, 2013.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodernisme*. Terj. Nurhadi, Cet XIII, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2019.
- Riyani, Irma. *Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia*. London dan New York: Routledge, 2021.
- Rofi, Ismatu. *Fragile Relation: Muslim and Christians in Modern Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Rohmawati, Wiwin Siti Aminah. "The Role of Women in Interreligious Dialogue in Indonesia: A Study on the Forum for Religious Harmony (FKUB), *The Muslim World*, Vol. 110 (Autumn 2020): 572-588.
- Ruhana, A. Salim, "FKUB sebagai Forum Kerja sama Antarumat Beragama," dalam *Harmoni*, Vol. VIII (April-June, 2009): 80-91.
- Sachs, Jeffrey D. dkk. *Sustainable Development Report 2022, From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond*. Cambridge: University Printing House, 2022.
- Saihu, Saihu. "Local Tradition and Harmony among Religious Adherents: the Dominant Culture of Hindu-Muslim Relation in Jembrana Bali," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 5, No. 1 (2020): 31-42.
- Samin, Yahya, dkk. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Santoso, Widjajanti M. "Identitas, Politik Tubuh Perempuan dan Media Televisi," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. V, No. 1 (2010): 75-90.

- Saputra, Dewi Riawati. *Perempuan Khonghucu dalam Kitab Suci Si Shu*. Jakarta: Matakin, 2018.
- Sari, Monica Putri Purnama dan Imam Setyawan. “Pengalaman Menjadi Biarawati Katolik: Studi Kualitatif Interpretative Phenomenological Analysis,” *Jurnal Empati*, Vol. 6, no 1 (Januari 2017): 287-290.
- Scheffler, Thomas. “Interreligious Dialogue and Peacebuilding,” *Die Friedens-Warte*, Vol. 82, No. 2/3 (2007): 173-187.
- Schippers, Mimi. “Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity, and Gender Hegemony,” *Theory and Society*, Vol. 36, No. 1 (February 2007): 85-102.
- Seiple, Chris, dkk. *Literasi Keagamaan Lintas Budaya: Anda, Mereka, dan Apa yang Dapat Dilakukan Bersama*. Jakarta: Perkumpulan Institut Leimena, 2023.
- Sile, Angelius Chrisantho Marician. I Wayan Suwena dan Ni Luh Arjani, “Relasi Gender Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal,” *Humanis: Journal of Arts and Humanities*, Vol 24, No. 2 (Mei 2020): 177-185.
- Sitorus, Bernat. “Membriara / Biarawati: Dalam Pandangan Agama Kristen,” *Majalah Ilmiah Methoda*, Vol. 12, Nomor 3 (September – Desember 2022): 300-307.
- Skeggs, Beverley. “Context and Background: Pierre Bourdieu’s Analysis of Class, Gender and Sexuality,” dalam Lisa Adkins & Beverley, editor Skeggs, *Feminism After Bourdieu*. Oxford: Blackwell, 2004.
- Sopyan, Imam, dan Ahmad Khairul Fata. “Religious Harmony, Godly Nationalism, and The Limits of State-Sponsored Interreligious Dialogue Agenda In Indonesia,” dalam *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 6, Nomor 2 (Desember 2020): 31-53.
- Srimulyani, Eka. “Negotiating Public Space: three Nyai, generations in a Jombang Pesantren,” *Indonesian Islam in a New Era: How Women Negotiate Their Muslim Identities*. Victoria: Monash University Press, 2008.

- Stuart, Alison. "Freedom of Religion and Gender Equality: Inclusive or Exclusive?," in *Human Rights Law Review 10*. Oxford University Press, 2010.
- Suartika, Gusti Ayu Made, John Zerby, dan Alexander R. Cuthbert. "Doors of Perception to Space-Time- Meaning: Ideology, Religion, and Aesthetics in Balinese Development," *Space and Culture*, No. 1 (2018): 1-18.
- Suhadi. *I Come from a Pancasila Family': A Discursive Study on Muslim-Christian Identity Transformation in Indonesian Post-Reformasi Era*. Munster: Lit Verlag, 2014.
- _____, dkk. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2008.
- Sumartana, Th. "Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi Tentang Hubungan Antaragama di Indonesia", dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Susilo, Daniel dan Abdul Kodir. "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan," *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2 (Februari 2016): 317-330.
- Sutanto, Trisno S. "Negara, Kekuasaan, dan "Agama": Membedah Politik Perukunan Rezim Orba," dalam Zainal Abidin Bagir, dkk. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2011.
- Swidler, Leonard. "A. Dialogue or Dialogue", dalam Leonard Swidler, dkk., *Death or Diaogue?*, *From the Age of Monologue to the Age of Dialogue*. Philadelphia: Trinity Press International, 1990.
- _____. "From the Age of Monologue to the Age of Global Dialogue" dalam editor Alan and Ingrid Shafer, *Religions in Dialogue: from Theocracy to Democracy*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2022.

_____. *Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions*. New York: Palgrave MacMillan, 2014.

Syafputri, Ella. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan," *IJIS*, Vol.1, No.2 (Desember 2014): 165-176.

Tamtelahitu, Dofita. "Profesi dan Panggilan: Harapan Menjadi Pendeta Masa Depan pada 'Fresh Graduate' Fakultas Teologi UKSW," tesis pada Program Pascasarjana Magister Manajemen UKSW, 2018.

Taranau, Dianita Aprissa L. "Feminisme dari Perspektif Protestan," *Musâwa*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2014): 111-117.

Temaja, I Gede Bagus Wisnu Bayu. "Sistem Penamaan Orang Bali," *Humanika*, Vol. 24, No.2 (2017): 60-72.

al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami 'al-bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid V, Beirut: Dar al-Fikri, 1988.

Thorpe, Holly, "Bourdieu, Feminism and Female Physical Culture: Gender Reflexivity and the Habitus-Field Complex," *Sociology of Sport Journal*, Vol. 26 (2009): 491-516.

Throsby, David. "Cultural Capital," *Journal of Cultural Economics* , Vol. 23, No. 1/2, Special Issue: Barcelona Conference Plenary Papers (1999): 3-12.

Tim Penyusun Kemenag RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Toyibah, Dzuriyatun. "Habitus, Agency and Political Participation of Female Students: A Study at an Islamic University in Indonesia," *Makara Hubs-Asia*, Vol. 21, No. 2, (December 2017): 113-121.

Virgianita, Asra. *Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. Depok: LAB 45 dan CIRESP-LPPSP FISIP Universitas Indonesia, 2021.

- Von Benda-Beckmann, Franz and Keebet. "Ambivalent identities; Decentralization and Minangkabau political communities," *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, (editor) Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. Leiden: KITLV, 2007.
- Wacquant, Loic J. D. "Towards a Reflexive Sociology: a Workshop with Pierre Bourdieu," *Sociological Theory*, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989): 26-63.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. London: Oneworld Publications, 2017.
- Wahyudi, Veri. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun 2018): 63-83.
- Wang, Robin R. "Dong Zhongshu's Transformation of "Yin-Yang" Theory and Contesting of Gender Identity," *Philosophy East and West*, Vol. 55, No. 2 (April 2005): 209-231.
- Waters, Malcolm. "Patriarchy And Viriarchy: An Exploration And Reconstruction Of Concepts Of Masculine Domination," *Sociology*, Vol. 23, No. 2 (May 1989): 193-211.
- Wati, Fatma dan Nong Hoban. "Dongo Sa'o: Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada-Flores," *Sanhet Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 5, No.2 (Oktober 2021): 125-137.
- Watt, W. Montgomery. *Islam and Christianity Today: A Contribution to Dialogue*, terj. Eno Syafrudien. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991.
- Webb, Jen. Tony Schirato and Geoff Danaher, *Understanding Bourdieu*. Sydney: Allen & Unwin, 2002.
- World Economic Forum. *Global Gender Gap Report 2023: Insight Report June 2023*. Geneva: World Economic Forum, 2023.

World Faiths Development Dialogue. *Interfaith Journeys An exploration of history, ideas, and future directions*, February 2017.

Wospakrik, Martha M. "Gender dan Perspektif Agama Kristen," *Jurnal Dinamis*, Vol 2. No. 12 (Desember 2013): 20-23.

Yuhaldi. "Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2022): 403-405.

Zainul Bahri, Media. "Expressing Political and Religious Identity Religion-Science Relations in Indonesian Muslim Thinkers 1970-2014," *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 56, no. 1 (2018): 155-186.

Zannella, Marina and Alessandra De Rose. "Fathers' and mothers' enjoyment of childcare," *Vienna Yearbook of Population Research*, Vol. 19, Special issue on Demographic aspects of human wellbeing (2021): 355-382.

Zega, Yunardi Kristian. "Perspektif Alkitab Tentang Kesetaraan Gender dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen," *Didaché: Journal of Christian Education*, Vol. 2, No. 2 (2021): 160-174.

Zulkarnain. "Warga Negara Religius sebagai Identitas Kewarganegaraan di Indonesia," Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

INTERNET

Affirmative action, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/> diakses 10 November 2023.

Alimat <https://kupipedia.id/index.php/Alimat>, diakses pada 1 Agustus 2023.

Ardovini-Brooker, Joanne. "Feminist Epistemology: The Foundation of Feminist Research and its Distinction from Traditional Research," *Advancing Women in Leadership*, Advancing Women Website, www.advancingwomen.com, diakses 14 Agustus 2023.

<http://www.kongregasi-sfd.org/2016/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses 25 Juli 2023.

<https://kbbi.web.id/cut>, diakses 22 Juli 2023

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada 22 Agustus 2023.

<https://www.bps.go.id/indicator/40/1337/1/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html>, diakses pada 5 September 2023.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1, diakses pada 22 Agustus 2023.

<https://dialogueinstitute.org/what-is-dialogue>, diakses pada 19 Mei 2023.

Merriam Webster, 'Masculine' diunduh dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/masculine>, diakses 17 November 2021.

Oxford Dictionaries, 'Masculine' diunduh dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/masculine>, diakses 17 November 2021.

Simak Besaran Gaji Polisi Berpangkat Kompol, AKBP, dan Kombes,
[//money.kompas.com/read/2023/02/02/082119326/simak-besaran-gaji-polisi-berpangkat-kompol-akbp-dan-kombes?page=all](http://money.kompas.com/read/2023/02/02/082119326/simak-besaran-gaji-polisi-berpangkat-kompol-akbp-dan-kombes?page=all), diakses 22 Juli, 2023